

## STANDAR KOMPETENSI JABATAN ASN

Nama Jabatan : Kepala Pelaksana  
 Kelompok Jabatan : Jabatan Pimpinan Tinggi  
 Urusan Pemerintah : Ketentraman dan Ketetapan Umum Serta Perlindungan Masyarakat  
 Kode Jabatan : -

I. IKHTISAR JABATAN			
Ikhtisar Jabatan	Menyelenggarakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan Daerah dibidang penanggulangan bencana Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan		
II. STANDAR KOMPETENSI			
Kompetensi	Level	Deskripsi	Indikator Kompetensi
A. Manajerial			
1. Integritas	4	Mampu menciptakan situasi kerja yang mendorong kepatuhan pada nilai, norma, dan etika organisasi	4.1. Menciptakan situasi kerja yang mendorong seluruh pemangku kepentingan mematuhi nilai, norma, dan etika organisasi dalam segala situasi dan kondisi. 4.2. Mendukung dan menerapkan prinsip moral dan standar etika yang tinggi, serta berani menanggung konsekuensinya. 4.3. Berani melakukan koreksi atau mengambil tindakan atas penyimpangan kode etik/nilai-nilai yang dilakukan oleh orang lain, pada tataran lingkup kerja setingkat instansi meskipun ada resiko.
2. Kerjasama	4	Membangun komitmen tim, sinergi	4.1. Membangun sinergi antar unit kerja di lingkup instansi yang dipimpin; 4.2. Memfasilitasi kepentingan yang berbeda dari unit kerja lain sehingga tercipta sinergi dalam rangka pencapaian target kerja organisasi. 4.3. Mengembangkan sistem yang menghargai kerja sama antar unit, memberikan dukungan / semangat untuk memastikan tercapainya sinergi dalam rangka pencapaian target kerja organisasi.
3. Komunikasi	4	Mampu mengemukakan pemikiran multidimensi secara lisan dan tertulis untuk mendorong	4.1 Mengintegrasikan informasi-informasi penting hasil diskusi dengan pihak lain untuk mendapatkan

		kesepakatan dengan tujuan meningkatkan kinerja secara keseluruhan	<p>pemahaman yang sama; Berbagi informasi dengan pemangku kepentingan untuk tujuan meningkatkan kinerja secara keseluruhan;</p> <p>4.2. Menuangkan pemikiran/konsep yang multidimensi dalam bentuk tulisan formal;</p> <p>4.3. Menyampaikan informasi secara persuasif untuk mendorong pemangku kepentingan sepakat pada langkah-langkah bersama dengan tujuan meningkatkan kinerja secara keseluruhan</p>
4. Orientasi pada Hasil	4	Mendorong unit kerja mencapai target yang ditetapkan atau melebihi hasil kerja sebelumnya	<p>4.1. Mendorong unit kerja di tingkat instansi untuk mencapai kinerja yang melebihi target yang ditetapkan;</p> <p>4.2. Memantau dan mengevaluasi hasil kerja unitnya agar selaras dengan sasaran strategis instansi;</p> <p>4.3. Mendorong pemanfaatan sumber daya bersama antar unit kerja dalam rangka meningkatkan efektifitas dan efisiensi pencapaian target organisasi</p>
5. Pelayanan Publik	4	Mampu memonitor, mengevaluasi, memperhitungkan dan mengantisipasi dampak dari isu-isu jangka panjang, kesempatan, atau kekuatan politik dalam hal pelayanan kebutuhan pemangku kepentingan yang transparan, objektif, dan profesional	<p>4.1. Memahami dan memberi perhatian kepada isu-isu jangka panjang, kesempatan atau kekuatan politik yang mempengaruhi organisasi dalam hubungannya dengan dunia luar, memperhitungkan dan mengantisipasi dampak terhadap pelaksanaan tugas-tugas pelayanan publik secara objektif, transparan, dan profesional dalam lingkup organisasi;</p> <p>4.2. Menjaga agar kebijakan pelayanan publik yang diselenggarakan oleh instansinya telah selaras dengan standar pelayanan yang objektif, netral, tidak memihak, tidak diskriminatif,</p>

			serta tidak terpengaruh kepentingan pribadi/kelompok/partai politik; 4.3. Menerapkan strategi jangka panjang yang berfokus pada pemenuhan kebutuhan pemangku kepentingan dalam menyusun kebijakan dengan mengikuti standar objektif, netral, tidak memihak, tidak diskriminatif, transparan, tidak terpengaruh kepentingan pribadi/kelompok
6. Pengembangan Diri dan Orang Lain	4	Menyusun program pengembangan jangka panjang dalam rangka mendorong manajemen pembelajaran	4.1. Menyusun program pengembangan jangka panjang bersama-sama dengan bawahan, termasuk didalamnya penetapan tujuan, bimbingan, penugasan dan pengalaman lainnya, serta mengalokasikan waktu untuk mengikuti pelatihan / pendidikan / pengembangan kompetensi dan karir; 4.2. Melaksanakan manajemen pembelajaran termasuk evaluasi dan umpan balik pada tataran organisasi; 4.3. Mengembangkan orang-orang disekitarnya secara konsisten, melakukan kaderisasi untuk posisi-posisi di unit kerjanya
7. Mengelola Perubahan	4	Memimpin perubahan pada unit kerja	4.1. Mengarahkan unit kerja untuk lebih siap dalam menghadapi perubahan termasuk memitigasi risiko yang mungkin terjadi; 4.2. Memastikan perubahan sudah diterapkan secara aktif di lingkup unit kerjanya secara berkala; 4.3. Memimpin dan memastikan penerapan program-program perubahan selaras antar unit kerja
8. Pengambilan Keputusan	4	Menyelesaikan masalah yang mengandung risiko tinggi, mengantisipasi dampak keputusan, membuat tindakan	4.1. Menyusun dan/atau memutuskan konsep penyelesaian masalah yang melibatkan beberapa/seluruh fungsi dalam organisasi.

		pengamanan; mitigasi risiko	<p>4.2. Menghasilkan solusi dari berbagai masalah yang kompleks, terkait dengan bidang kerjanya yang berdampak pada pihak lain.</p> <p>4.3. Membuat keputusan dan mengantisipasi dampak keputusannya serta menyiapkan tindakan penanganannya (mitigasi risiko)</p>
<b>B. Sosial Kultural</b>			
9. Perikat Bangsa	4	Mendayagunakan perbedaan secara konstruktif dan kreatif untuk meningkatkan efektifitas organisasi	<p>4.1 Menginisiasi dan merepresentasikan pemerintah di lingkungan kerja dan masyarakat untuk senantiasa menjaga persatuan dan kesatuan dalam keberagaman dan menerima segala bentuk perbedaan dalam kehidupan bermasyarakat;</p> <p>4.2 Mampu mendayagunakan perbedaan latar belakang, agama/kepercayaan, suku, jender, sosial ekonomi, preferensi politik untuk mencapai kelancaran pencapaian tujuan organisasi.</p> <p>4.3 Mampu membuat program yang mengakomodasi perbedaan latar belakang, agama/kepercayaan, suku, jender, sosial ekonomi, preferensi politik</p>
<b>C. Teknis</b>			
10. Advokasi Kebijakan Otonomi Daerah	4	Mampu mengembangkan strategi advokasi kebijakan otonomi daerah yang tepat sesuai kondisi.	<p>4.1 Mengevaluasi strategi advokasi yang ada saat ini, menganalisis kekuatan dan kekurangan berbagai metode yang dijalankan dengan kelompok sasaran yang berbeda.</p> <p>4.2 Mengembangkan norma standar, prosedur, kriteria, pedoman, dan/atau petunjuk teknis strategi advokasi kebijakan otonomi daerah.</p> <p>4.3 Meningkatkan kapasitas pemangku kepentingan untuk mengembangkan strategi</p>

			advokasi yang dapat dijalankan oleh mereka sendiri dalam menerapkan kebijakan otonomi daerah.
11. Advokasi Kebijakan Ketentraman dan Ketertiban umum serta Perlindungan Masyarakat	4	Mampu mengevaluasi dan menyusun perangkat norma standar prosedur instrument pengelolaan Advokasi Kebijakan Ketentraman dan Ketertiban umum serta Perlindungan Masyarakat	<p>4.1 Mampu melakukan evaluasi terhadap teknis/metode/sistem cara kerja menemu kenali kelebihan dan kekurangan melakukan pengembangan atau perbaikan cara kerja pengelolaan Advokasi Kebijakan Ketentraman dan Ketertiban umum serta Perlindungan Masyarakat</p> <p>4.2 Mampu menyusun pedoman, petunjuk teknis, cara kerja yang dijadikan norma standar, prosedur, instrumen pelaksanaan pengelolaan Advokasi Kebijakan Ketentraman dan Ketertiban umum serta Perlindungan Masyarakat</p> <p>4.3 Mampu meyakinkan dan memperoleh dukungan dari stakeholder pelaksanaan pengelolaan Advokasi Kebijakan Ketentraman dan Ketertiban umum serta Perlindungan Masyarakat dan memberikan bimbingan dan fasilitasi kepada instansi lain atau stakeholder terkait Advokasi Kebijakan Ketentraman dan Ketertiban umum serta Perlindungan Masyarakat</p>
12. Pencegahan dan Kesiapsiagaan Bencana	4	Mampu mengevaluasi dan menyusun perangkat norma standar prosedur instrument pengelolaan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Bencana	<p>4.1 Mampu melakukan evaluasi terhadap teknis/metode/sistem cara kerja menemu kenali kelebihan dan kekurangan melakukan pengembangan atau perbaikan cara kerja Pencegahan dan Kesiapsiagaan Bencana</p> <p>4.2 Mampu menyusun pedoman, petunjuk teknis, cara kerja yang dijadikan norma standar, prosedur, instrumen pelaksanaan Pencegahan dan</p>

			<p>Kesiapsiagaan Bencana</p> <p>4.3 Mampu meyakinkan dan memperoleh dukungan dari stakeholder pelaksanaan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Bencana dan memberikan bimbingan dan fasilitasi kepada instansi lain atau stakeholder terkait Pencegahan dan Kesiapsiagaan Bencana</p>
13. Penanganan Darurat	4	Mampu mengevaluasi dan menyusun perangkat norma standar prosedur instrument Penanganan Darurat	<p>4.1 Mampu melakukan evaluasi terhadap teknis/metode/sistem cara kerja menemu kenali kelebihan dan kekurangan melakukan pengembangan atau perbaikan cara kerja Penanganan Darurat</p> <p>4.2 Mampu menyusun pedoman, petunjuk teknis, cara kerja yang dijadikan norma standar, prosedur, instrumen pelaksanaan Penanganan Darurat</p> <p>4.3 Mampu meyakinkan dan memperoleh dukungan dari stakeholder pelaksanaan Penanganan Darurat dan memberikan bimbingan dan fasilitasi kepada instansi lain atau stakeholder terkait Penanganan Darurat</p>
14. Pengelolaan Distribusi Logistik	4	Mampu mengevaluasi dan menyusun perangkat norma standar prosedur instrument Pengelolaan Distribusi Logistik	<p>4.1 Mampu melakukan evaluasi terhadap teknis/metode/sistem cara kerja menemu kenali kelebihan dan kekurangan melakukan pengembangan atau perbaikan cara kerja Pengelolaan Distribusi Logistik</p> <p>4.2 Mampu menyusun pedoman, petunjuk teknis, cara kerja yang dijadikan norma standar, prosedur, instrumen pelaksanaan Pengelolaan Distribusi Logistik</p> <p>4.3 Mampu meyakinkan dan memperoleh dukungan dari stakeholder Pengelolaan Distribusi Logistik dan memberikan bimbingan dan</p>

			fasilitasi kepada instansi lain atau stakeholder terkait Pemberdayaan Pengelolaan Distribusi Logistik
15. Rehabilitasi dan Rekonstruksi	4	Mampu mengevaluasi dan menyusun perangkat norma standar prosedur instrument pengelolaan Rehabilitasi dan Rekonstruksi	<p>4.1 Mampu melakukan evaluasi terhadap teknis/metode/sistem cara kerja menemu kenali kelebihan dan kekurangan melakukan pengembangan atau perbaikan cara kerja pengelolaan Rehabilitasi dan Rekonstruksi</p> <p>4.2 Mampu menyusun pedoman, petunjuk teknis, cara kerja yang dijadikan norma standar, prosedur, instrumen pelaksanaan pengelolaan Rehabilitasi dan Rekonstruksi</p> <p>4.3 Mampu meyakinkan dan memperoleh dukungan dari stakeholder pelaksanaan pengelolaan Rehabilitasi dan Rekonstruksi dan memberikan bimbingan dan fasilitasi kepada instansi lain atau stakeholder terkait Pengawasan Pengelolaan Rehabilitasi dan Rekonstruksi</p>

### III. Persyaratan Jabatan

Jenis Persyaratan		Uraian	Tingkat Pentingnya terhadap Jabatan		
			Mutlak	Penting	Perlu
A. Pendidikan	1. Jenjang	Memiliki kualifikasi pendidikan paling rendah sarjana atau diploma IV			
	2. Bidang Ilmu	Sarjana/Pemerintah, Ekonomi, Manajemen			
B. Pelatihan	1. Manajerial	Pelatihan Kepemimpinan Pratama	√		
	2. Teknis	1. Diklat analisis kebijakan pemerintah daerah 2. Diklat evaluasi penyelenggaraan pemerintahan daerah 3. Diklat manajemen pembangunan kesejahteraan sosial 4. Diklat manajemen pelayanan sosial bagi aparatur		√ √ √	√

		5. Diklat Pengadaan Barang dan Jasa			√
	3. Fungsional	-			
C. Pengalaman Kerja		<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Memiliki pengalaman Jabatan dalam bidang tugas yang terkait dengan Jabatan yang akan diduduki secara kumulatif paling kurang selama 5 (lima) tahun.</li> <li>2. Sedang atau pernah menduduki Jabatan administrator atau JF jenjang ahli madya paling singkat 2 (dua) tahun.</li> <li>3. Memiliki rekam jejak Jabatan, integritas, dan moralitas yang baik</li> </ol>	√		
D. Pangkat	Minimal pembina / IV.a				
E. Indikator Kinerja Jabatan	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Persentase penanggulangan bencana yang meningkat</li> <li>2. Kuantitas pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana</li> <li>3. Kuantitas kedaruratan serta peralatan dan logistik bencana</li> <li>4. Optimalisasi rehabilitasi dan rekonstruksi pasca bencana</li> </ol>				

## SSTANDAR KOMPETENSI JABATAN ASN

Nama Jabatan	:	Sekretaris
Kelompok Jabatan	:	Jabatan Administrasi
Urusan Pemerintah	:	Ketentraman dan Ketertiban Umum Serta Perlindungan Masyarakat
Kode Jabatan	:	

I. IKHTISAR JABATAN			
<b>Ikhtisar Jabatan</b>	Memimpin, Merencanakan, Melaksanakan, Mengatur, Memberi Petunjuk, Membagi Tugas, Mengoordinasikan dan Mengendalikan Penyelenggaraan Tugas Sekretariat Badan Penanggulangan Bencana Daerah		
II. STANDAR KOMPETENSI			
Kompetensi	Level	Deskripsi	Indikator Kompetensi
A. Manajerial			
1. <b>Integritas</b>	3	Mampu memastikan, menanamkan keyakinan bersama agar anggota yang dipimpin bertindak sesuai nilai, norma, dan etika organisasi, dalam lingkup formal	3.1 Memastikan anggota yang dipimpin bertindak sesuai dengan nilai, norma, dan etika organisasi dalam segala situasi dan kondisi 3.2 Mampu untuk memberi apresiasi dan teguran bagi anggota yang dipimpin agar bertindak selaras dengan nilai, norma, dan etika organisasi dalam segala situasi dan kondisi 3.3 Melakukan monitoring dan evaluasi terhadap penerapan sikap integritas di dalam unit kerja yang dipimpin
2. <b>Kerjasama</b>	3	Efektif membangun tim kerja untuk peningkatan kinerja organisasi	3.1. Melihat kekuatan/kelemahan anggota tim, membentuk tim yang tepat, mengantisipasi kemungkinan hambatan, dan mencari solusi yang optimal 3.2. Mengupayakan dan mengutamakan pengambilan keputusan berdasarkan usulan-usulan anggota tim/kelompok, bernegosiasi secara efektif untuk upaya penyelesaian pekerjaan yang menjadi target kinerja kelompok dan/atau unit kerja 3.3. Membangun aliansi dengan para pemangku kepentingan dalam rangka mendukung penyelesaian target kerja kelompok
3. <b>Komunikasi</b>	3	Berkomunikasi secara asertif, terampil berkomunikasi lisan/tertulis untuk menyampaikan informasi yang	3.1 Menyampaikan suatu informasi yang sensitif/rumit dengan cara penyampaian dan kondisi yang tepat, sehingga dapat dipahami dan diterima oleh pihak lain

		sensitif/ rumit/ kompleks	<p>3.2. Menyederhanakan topik yang rumit dan sensitif sehingga lebih mudah dipahami dan diterima orang lain</p> <p>3.3. Membuat laporan tahunan/periodik/naskah/dokumen/proposal yang kompleks; Membuat surat resmi yang sistematis dan tidak menimbulkan pemahaman yang berbeda; membuat proposal yang rinci dan lengkap</p>
<b>4. Orientasi pada Hasil</b>	3	Menetapkan target kerja yang menantang bagi unit kerja, memberi apresiasi dan teguran untuk mendorong kinerja	<p>3.1. Menetapkan target kinerja unit yang lebih tinggi dari target yang ditetapkan organisasi</p> <p>3.2. Memberikan apresiasi dan teguran untuk mendorong pencapaian hasil unit kerjanya</p> <p>3.3. Mengembangkan metode kerja yang lebih efektif dan efisien untuk mencapai target kerja unitnya</p>
<b>5. Pelayanan Publik</b>	3	Mampu memanfaatkan kekuatan kelompok serta memperbaiki standar pelayanan publik di lingkup unit kerja	<p>3.1. Memahami, mendeskripsikan pengaruh dan hubungan/kekuatan kelompok yang sedang berjalan di organisasi (aliansi atau persaingan), dan dampaknya terhadap unit kerja untuk menjalankan tugas pemerintahan secara profesional dan netral, tidak memihak</p> <p>3.2. Menggunakan keterampilan dan pemahaman lintas organisasi untuk secara efektif memfasilitasi kebutuhan kelompok yang lebih besar dengan cara-cara yang mengikuti standar objektif, transparan, profesional, sehingga tidak merugikan para pihak di lingkup pelayanan publik unit kerjanya</p> <p>3.3. Mengimplementasikan cara-cara yang efektif untuk memantau dan mengevaluasi masalah yang dihadapi pemangku kepentingan/masyarakat serta mengantisipasi kebutuhan mereka saat menjalankan tugas pelayanan publik di unit kerjanya</p>
<b>6. Pengembangan Diri dan Orang Lain</b>	3	Memberikan umpan balik, membimbing	<p>3.1. Memberikan tugas-tugas yang menantang pada bawahan sebagai media belajar untuk mengembangkan kemampuannya</p>

			<p>3.2. Mengamati bawahan dalam mengerjakan tugasnya dan memberikan umpan balik yang objektif dan jujur; melakukan diskusi dengan bawahan untuk memberikan bimbingan dan umpan balik yang berguna bagi bawahan</p> <p>3.3. Mendorong kepercayaan diri bawahan; memberikan kepercayaan penuh pada bawahan untuk mengerjakan tugas dengan caranya sendiri; memberi kesempatan dan membantu bawahan menemukan peluang untuk berkembang</p>
<b>7. Mengelola Perubahan</b>	3	Membantu orang lain mengikuti perubahan, mengantisipasi perubahan secara tepat	<p>3.1. Membantu orang lain dalam melakukan perubahan</p> <p>3.2. Menyesuaikan prioritas kerja secara berulang-ulang jika diperlukan</p> <p>3.3. Mengantisipasi perubahan yang dibutuhkan oleh unit kerjanya secara tepat. Memberikan solusi efektif terhadap masalah yang ditimbulkan oleh adanya perubahan</p>
<b>8. Pengambilan Keputusan</b>	3	Membandingkan berbagai alternatif, menyeimbangkan risiko keberhasilan dalam implementasi	<p>3.1. Membandingkan berbagai alternatif tindakan dan implikasinya</p> <p>3.2. Memilih alternatif solusi yang terbaik, membuat keputusan operasional mengacu pada alternatif solusi terbaik yang didasarkan pada analisis data yang sistematis, seksama, mengikuti prinsip kehati-hatian</p> <p>3.3. Menyeimbangkan antara kemungkinan risiko dan keberhasilan dalam implementasinya</p>
<b>B. Sosial Kultural</b>			
<b>9. Perekat Bangsa</b>	3	Mempromosikan, mengembangkan sikap toleransi dan persatuan	<p>3.1. Mempromosikan sikap menghargai perbedaan di antara orang-orang yang mendorong toleransi dan keterbukaan</p> <p>3.2. Melakukan pemetaan sosial di masyarakat sehingga dapat memberikan respon yang sesuai dengan budaya yang berlaku. Mengidentifikasi potensi kesalahpahaman yang diakibatkan adanya keragaman budaya yang ada</p> <p>3.3. Menjadi mediator untuk menyelesaikan konflik atau</p>

			mengurangi dampak negatif dari konflik atau potensi konflik
<b>C. Teknis</b>			
10. <b>Advokasi Kebijakan Otonomi Daerah</b>	3	Mampu menyelenggarakan <b>advokasi kebijakan otonomi daerah</b>	<p>3.1 Mampu menyusun instrumen, materi, dan kelengkapan pelaksanaan <b>advokasi kebijakan otonomi daerah</b>.</p> <p>3.2 Mampu mengembangkan serta menjalankan strategi atau intervensi advokasi dalam mengatasi hambatan sistemik dan resistensi pemangku kepentingan dalam menerapkan kebijakan otonomi daerah</p> <p>3.3 Mampu mengimplementasikan strategi advokasi dengan target dan waktu yang terukur dan terencana dengan mendapatkan hasil sesuai yang diharapkan</p>
11. <b>Advokasi Kebijakan Ketentraman dan Ketertiban umum serta Perlindungan Masyarakat</b>	3	Mampu mengidentifikasi Prinsip-prinsip teori dan praktek tanpa bantuan atau pengawasan langsung tentang pengembangan <b>Advokasi Kebijakan Ketentraman dan Ketertiban umum serta Perlindungan Masyarakat</b> Strategis yang dimiliki oleh organisasi dengan menggunakan metode yang sistematis.	<p>3.1 Menguasai pengetahuan dan keterampilan tentang <b>Advokasi Kebijakan Ketentraman dan Ketertiban umum serta Perlindungan Masyarakat</b> dalam rangka tercapainya tujuan visi dan misi organisasi dengan mengikuti pelatihan tingkat menengah</p> <p>3.2 Mampu melakukan tugas <b>Advokasi Kebijakan Ketentraman dan Ketertiban umum serta Perlindungan Masyarakat</b> secara spesifik dan menganalisis informasi untuk menyelesaikan permasalahan yang timbul dalam tugas</p> <p>3.3 Mampu menganalisa proses pelaksanaan <b>Advokasi Kebijakan Ketentraman dan Ketertiban umum serta Perlindungan Masyarakat</b> tanpa bantuan atau pengawasan langsung dengan kecepatan dan penyelesaian yang lebih tepat</p>
12. <b>Perumusan dan Penyusunan Rencana Strategis</b>	3	Mampu mengidentifikasi Prinsip-prinsip teori dan praktek tanpa bantuan atau pengawasan langsung tentang <b>Perumusan</b>	<p>3.1 Menguasai pengetahuan dan keterampilan tentang <b>Perumusan dan Penyusunan Rencana Strategis</b> dalam rangka tercapainya tujuan visi dan misi organisasi dengan mengikuti pelatihan tingkat menengah</p>

		<p><b>dan Penyusunan Rencana Strategis</b> yang dimiliki oleh organisasi dengan menggunakan metode yang sistematis.</p>	<p>3.2 Mampu melakukan tugas <b>Perumusan dan Penyusunan Rencana Strategis</b> secara spesifik dan menganalisis informasi untuk menyelesaikan permasalahan yang timbul dalam tugas</p> <p>3.3 Mampu menganalisa proses pelaksanaan <b>Perumusan dan Penyusunan Rencana Strategis</b> tanpa bantuan atau pengawasan langsung dengan kecepatan dan penyelesaian yang lebih tepat</p>
13. <b>Manajemen Perkantoran</b>	3	<p>Mampu mengidentifikasi Prinsip-prinsip teori dan praktek tanpa bantuan atau pengawasan langsung tentang <b>Manajemen Perkantoran</b> yang dimiliki oleh organisasi dengan menggunakan metode yang sistematis.</p>	<p>3.1 Menguasai pengetahuan dan keterampilan tentang <b>Manajemen Perkantoran</b> dalam rangka tercapainya tujuan visi dan misi organisasi dengan mengikuti pelatihan tingkat menengah</p> <p>3.2 Mampu melakukan tugas <b>Manajemen Perkantoran</b> secara spesifik dan menganalisis informasi untuk menyelesaikan permasalahan yang timbul dalam tugas</p> <p>3.3 Mampu menganalisa proses pelaksanaan <b>Manajemen Perkantoran</b> tanpa bantuan atau pengawasan langsung dengan kecepatan dan penyelesaian yang lebih tepat</p>
14. <b>Administrasi Kepegawaian</b>	3	<p>Mampu mengidentifikasi Prinsip-prinsip teori dan praktek tanpa bantuan atau pengawasan langsung tentang <b>Administrasi Kepegawaian</b> di organisasi yang dimiliki oleh organisasi dengan menggunakan metode yang sistematis.</p>	<p>3.1 Menguasai pengetahuan dan keterampilan tentang <b>Administrasi Kepegawaian</b> di organisasi dalam rangka tercapainya tujuan visi dan misi organisasi dengan mengikuti pelatihan tingkat menengah</p> <p>3.2 Mampu melakukan tugas <b>Administrasi Kepegawaian</b> di organisasi secara spesifik dan menganalisis informasi untuk menyelesaikan permasalahan yang timbul dalam tugas</p> <p>3.3 Mampu menganalisa proses pelaksanaan <b>Administrasi Kepegawaian</b> di organisasi tanpa bantuan atau pengawasan langsung dengan kecepatan dan penyelesaian yang lebih tepat</p>
15. <b>Manajemen Keuangan</b>	3	<p>Mampu mengidentifikasi</p>	<p>3.1 Menguasai pengetahuan dan keterampilan tentang <b>Manajemen</b></p>



## STANDAR KOMPETENSI JABATAN ASN

**Nama Jabatan** : Bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan  
**Kelompok Jabatan** : Jabatan Administrasi  
**Urusan Pemerintah** : Ketentraman dan Ketertiban Umum Serta Perlindungan Masyarakat  
**Kode Jabatan** :

I. IKHTISAR JABATAN			
<b>Ikhtisar Jabatan</b>	Memimpin dan melaksanakan perumusan kebijakan teknis, memberikan dukungan atas penyelenggaraan urusan Pemerintahan Daerah, membina, mengoordinasikan dan melaksanakan program dan kegiatan dibidang pencegahan dan kesiapsiagaan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan		
II. STANDAR KOMPETENSI			
Kompetensi	Level	Deskripsi	Indikator Kompetensi
A. Manajerial			
1. <b>Integritas</b>	3	Mampu memastikan, menanamkan keyakinan bersama agar anggota yang dipimpin bertindak sesuai nilai, norma, dan etika organisasi, dalam lingkup formal	3.1 Memastikan anggota yang dipimpin bertindak sesuai dengan nilai, norma, dan etika organisasi dalam segala situasi dan kondisi 3.2 Mampu untuk memberi apresiasi dan teguran bagi anggota yang dipimpin agar bertindak selaras dengan nilai, norma, dan etika organisasi dalam segala situasi dan kondisi 3.3 Melakukan monitoring dan evaluasi terhadap penerapan sikap integritas di dalam unit kerja yang dipimpin
2. <b>Kerjasama</b>	3	Efektif membangun tim kerja untuk peningkatan kinerja organisasi	3.1. Melihat kekuatan/kelemahan anggota tim, membentuk tim yang tepat, mengantisipasi kemungkinan hambatan, dan mencari solusi yang optimal 3.2. Mengupayakan dan mengutamakan pengambilan keputusan berdasarkan usulan-usulan anggota tim/kelompok, bernegosiasi secara efektif untuk upaya penyelesaian pekerjaan yang menjadi target kinerja kelompok dan/atau unit kerja 3.3. Membangun aliansi dengan para pemangku kepentingan dalam rangka mendukung penyelesaian target kerja kelompok
3. <b>Komunikasi</b>	3	Berkomunikasi secara asertif, terampil berkomunikasi lisan/ tertulis untuk	3.1 Menyampaikan suatu informasi yang sensitif/rumit dengan cara penyampaian dan kondisi yang tepat, sehingga dapat dipahami dan

		menyampaikan informasi yang sensitif/ rumit/ kompleks	diterima oleh pihak lain 3.2. Menyederhanakan topik yang rumit dan sensitif sehingga lebih mudah dipahami dan diterima orang lain 3.3. Membuat laporan tahunan/periodik/naskah/dokumen/proposal yang kompleks; Membuat surat resmi yang sistematis dan tidak menimbulkan pemahaman yang berbeda; membuat proposal yang rinci dan lengkap
<b>4. Orientasi pada Hasil</b>	3	Menetapkan target kerja yang menantang bagi unit kerja, memberi apresiasi dan teguran untuk mendorong kinerja	3.1. Menetapkan target kinerja unit yang lebih tinggi dari target yang ditetapkan organisasi 3.2. Memberikan apresiasi dan teguran untuk mendorong pencapaian hasil unit kerjanya 3.3. Mengembangkan metode kerja yang lebih efektif dan efisien untuk mencapai target kerja unitnya
<b>5. Pelayanan Publik</b>	3	Mampu memanfaatkan kekuatan kelompok serta memperbaiki standar pelayanan publik di lingkup unit kerja	3.1. Memahami, mendeskripsikan pengaruh dan hubungan/kekuatan kelompok yang sedang berjalan di organisasi (aliansi atau persaingan), dan dampaknya terhadap unit kerja untuk menjalankan tugas pemerintahan secara profesional dan netral, tidak memihak 3.2. Menggunakan keterampilan dan pemahaman lintas organisasi untuk secara efektif memfasilitasi kebutuhan kelompok yang lebih besar dengan cara-cara yang mengikuti standar objektif, transparan, profesional, sehingga tidak merugikan para pihak di lingkup pelayanan publik unit kerjanya 3.3. Mengimplementasikan cara-cara yang efektif untuk memantau dan mengevaluasi masalah yang dihadapi pemangku kepentingan/masyarakat serta mengantisipasi kebutuhan mereka saat menjalankan tugas pelayanan publik di unit kerjanya
<b>6. Pengembangan Diri dan Orang Lain</b>	3	Memberikan umpan balik, membimbing	3.1. Memberikan tugas-tugas yang menantang pada bawahan sebagai media belajar untuk mengembangkan kemampuannya

			<p>3.2. Mengamati bawahan dalam mengerjakan tugasnya dan memberikan umpan balik yang objektif dan jujur; melakukan diskusi dengan bawahan untuk memberikan bimbingan dan umpan balik yang berguna bagi bawahan</p> <p>3.3. Mendorong kepercayaan diri bawahan; memberikan kepercayaan penuh pada bawahan untuk mengerjakan tugas dengan caranya sendiri; memberi kesempatan dan membantu bawahan menemukan peluang untuk berkembang</p>
<b>7. Mengelola Perubahan</b>	3	Membantu orang lain mengikuti perubahan, mengantisipasi perubahan secara tepat	<p>3.1. Membantu orang lain dalam melakukan perubahan</p> <p>3.2. Menyesuaikan prioritas kerja secara berulang-ulang jika diperlukan</p> <p>3.3. Mengantisipasi perubahan yang dibutuhkan oleh unit kerjanya secara tepat. Memberikan solusi efektif terhadap masalah yang ditimbulkan oleh adanya perubahan</p>
<b>8. Pengambilan Keputusan</b>	3	Membandingkan berbagai alternatif, menyeimbangkan risiko keberhasilan dalam implementasi	<p>3.1. Membandingkan berbagai alternatif tindakan dan implikasinya</p> <p>3.2. Memilih alternatif solusi yang terbaik, membuat keputusan operasional mengacu pada alternatif solusi terbaik yang didasarkan pada analisis data yang sistematis, seksama, mengikuti prinsip kehati-hatian</p> <p>3.3. Menyeimbangkan antara kemungkinan risiko dan keberhasilan dalam implementasinya</p>
<b>B. Sosial Kultural</b>			
<b>9. Perekat Bangsa</b>	3	Mempromosikan, mengembangkan sikap toleransi dan persatuan	<p>3.1. Mempromosikan sikap menghargai perbedaan di antara orang-orang yang mendorong toleransi dan keterbukaan</p> <p>3.2. Melakukan pemetaan sosial di masyarakat sehingga dapat memberikan respon yang sesuai dengan budaya yang berlaku. Mengidentifikasi potensi kesalahpahaman yang diakibatkan adanya keragaman budaya yang ada</p> <p>3.3. Menjadi mediator untuk menyelesaikan konflik atau</p>

			mengurangi dampak negatif dari konflik atau potensi konflik
<b>C. Teknis</b>			
10. <b>Advokasi Kebijakan Otonomi Daerah</b>	3	Mampu menyelenggarakan <b>advokasi kebijakan otonomi daerah</b>	<p>3.1 Mampu menyusun instrumen, materi, dan kelengkapan pelaksanaan <b>advokasi kebijakan otonomi daerah</b>.</p> <p>3.2 Mampu mengembangkan serta menjalankan strategi atau intervensi advokasi dalam mengatasi hambatan sistemik dan resistensi pemangku kepentingan dalam menerapkan kebijakan otonomi daerah</p> <p>3.3 Mampu mengimplementasikan strategi advokasi dengan target dan waktu yang terukur dan terencana dengan mendapatkan hasil sesuai yang diharapkan</p>
11. <b>Advokasi Kebijakan Ketentraman dan Ketertiban umum serta Perlindungan Masyarakat</b>	3	Mampu mengidentifikasi Prinsip-prinsip teori dan praktek tanpa bantuan atau pengawasan langsung tentang pengembangan <b>Advokasi Kebijakan Ketentraman dan Ketertiban umum serta Perlindungan Masyarakat</b> Strategis yang dimiliki oleh organisasi dengan menggunakan metode yang sistematis.	<p>3.1 Menguasai pengetahuan dan keterampilan tentang <b>Advokasi Kebijakan Ketentraman dan Ketertiban umum serta Perlindungan Masyarakat</b> dalam rangka tercapainya tujuan visi dan misi organisasi dengan mengikuti pelatihan tingkat menengah</p> <p>3.2 Mampu melakukan tugas <b>Advokasi Kebijakan Ketentraman dan Ketertiban umum serta Perlindungan Masyarakat</b> secara spesifik dan menganalisis informasi untuk menyelesaikan permasalahan yang timbul dalam tugas</p> <p>3.3 Mampu menganalisa proses pelaksanaan <b>Advokasi Kebijakan Ketentraman dan Ketertiban umum serta Perlindungan Masyarakat</b> tanpa bantuan atau pengawasan langsung dengan kecepatan dan penyelesaian yang lebih tepat</p>
12. <b>Pencegahan dan Kesiapsiagaan Bencana</b>	3	Mampu mengidentifikasi Prinsip-prinsip teori dan praktek tanpa bantuan atau pengawasan	<p>3.1 Menguasai pengetahuan dan keterampilan tentang <b>Pencegahan dan Kesiapsiagaan Bencana</b> dalam rangka tercapainya tujuan visi dan misi organisasi dengan mengikuti pelatihan tingkat</p>

		<p>langsung tentang <b>Pencegahan dan Kesiapsiagaan Bencana</b> yang dimiliki oleh organisasi dengan menggunakan metode yang sistematis.</p>	<p>3.2 menengah Mampu melakukan tugas <b>Pencegahan dan Kesiapsiagaan Bencana</b> secara spesifik dan menganalisis informasi untuk menyelesaikan permasalahan yang timbul dalam tugas</p> <p>3.3 Mampu menganalisa proses pelaksanaan <b>Pencegahan dan Kesiapsiagaan Bencana</b> tanpa bantuan atau pengawasan langsung dengan kecepatan dan penyelesaian yang lebih tepat</p>
13. Perumusan kebijakan teknis	3	<p>Mampu mengidentifikasi Prinsip-prinsip teori dan praktek tanpa bantuan atau pengawasan langsung tentang <b>Perumusan kebijakan teknis</b> yang dimiliki oleh organisasi dengan menggunakan metode yang sistematis.</p>	<p>3.1 Menguasai pengetahuan dan keterampilan tentang <b>Perumusan kebijakan teknis</b> dalam rangka tercapainya tujuan visi dan misi organisasi dengan mengikuti pelatihan tingkat menengah</p> <p>3.2 Mampu melakukan tugas <b>Perumusan kebijakan teknis</b> secara spesifik dan menganalisis informasi untuk menyelesaikan permasalahan yang timbul dalam tugas</p> <p>3.3 Mampu menganalisa proses pelaksanaan <b>Perumusan kebijakan teknis</b> tanpa bantuan atau pengawasan langsung dengan kecepatan dan penyelesaian yang lebih tepat</p>
14. Penelaahan bahan kajian di bidang bencana alam	3	<p>Mampu mengidentifikasi Prinsip-prinsip teori dan praktek tanpa bantuan atau pengawasan langsung tentang <b>Penelaahan bahan kajian di bidang bencana alam</b> di organisasi yang dimiliki oleh organisasi dengan menggunakan metode yang sistematis.</p>	<p>3.1 Menguasai pengetahuan dan keterampilan tentang <b>Penelaahan bahan kajian di bidang bencana alam</b> di organisasi dalam rangka tercapainya tujuan visi dan misi organisasi dengan mengikuti pelatihan tingkat menengah</p> <p>3.2 Mampu melakukan tugas <b>Penelaahan bahan kajian di bidang bencana alam</b> di organisasi secara spesifik dan menganalisis informasi untuk menyelesaikan permasalahan yang timbul dalam tugas</p> <p>3.3 Mampu menganalisa proses pelaksanaan <b>Penelaahan bahan kajian di bidang bencana alam</b> di organisasi tanpa bantuan atau pengawasan langsung dengan</p>

			kecepatan dan penyelesaian yang lebih tepat
15. <b>Penyuluhan, evaluasi dan pelaporan di bidang bencana</b>	3	Mampu mengidentifikasi Prinsip-prinsip teori dan praktek tanpa bantuan atau pengawasan langsung tentang <b>Penyuluhan, evaluasi dan pelaporan di bidang bencana</b> yang dimiliki oleh organisasi dengan menggunakan metode yang sistematis.	<p>3.1 Menguasai pengetahuan dan keterampilan tentang <b>Penyuluhan, evaluasi dan pelaporan di bidang bencana</b> dalam rangka tercapainya tujuan visi dan misi organisasi dengan mengikuti pelatihan tingkat menengah</p> <p>3.2 Mampu melakukan tugas <b>Penyuluhan, evaluasi dan pelaporan di bidang bencana</b> secara spesifik dan menganalisis informasi untuk menyelesaikan permasalahan yang timbul dalam tugas</p> <p>3.3 Mampu menganalisa proses pelaksanaan <b>Penyuluhan, evaluasi dan pelaporan di bidang bencana</b> tanpa bantuan atau pengawasan langsung dengan kecepatan dan penyelesaian yang lebih tepat</p>

III. Persyaratan Jabatan					
Jenis Persyaratan		Uraian	Tingkat Pentingnya terhadap Jabatan		
			Mutlak	Penting	Perlu
A. Pendidikan	1. Jenjang	Memiliki kualifikasi pendidikan paling rendah Sarjana atau Diploma IV			
	2. Bidang Ilmu	Sarjana/Bidang Psikologi Umum, Manajemen, Sosiologi, Administrasi, Bidang Geologi, Bidang Sosial dan bidang yang relevan dengan tugas Jabatan			
B. Pelatihan	1. Manajerial	- Pelatihan Kepemimpinan Administrator	√		
	2. Teknis	- Diklat Teknis Pencegahan dan Kesiapsiagaan		√	
		- Diklat Manajemen Stratejik		√	
- Diklat Pemerintahan Daerah			√		
- Diklat Penanganan Bencana Alam			√		
	- Diklat Pelatihan Dasar Manajemen Penanggulangan Bencana		√		
	3. Fungsional				
C. Pengalaman Kerja		- Memiliki pengalaman dalam Jabatan pelaksana paling singkat 4 (empat) tahun atau JF yang setingkat dengan Jabatan pelaksana sesuai dengan bidang	√		

	tugas Jabatan yang akan diduduki. - Memiliki integritas dan moralitas yang baik.	√		
<b>D. Pangkat</b>	Penata Tk. I / III.d			
<b>E. Indikator Kinerja Jabatan</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Kualitas perumusan kebijakan teknis</li> <li>2. Optimalisasi penyelenggaraan urusan Pemerintahan Daerah</li> <li>3. Optimalisasi Penyusunan Rencana dan Program</li> <li>4. Optimalisasi pelaksanaan program dan kegiatan dibidang pencegahan dan kesiapsiagaan</li> </ol>			

## STANDAR KOMPETENSI JABATAN ASN

<b>Nama Jabatan</b>	:	Bidang Kedaruratan dan Logistik
<b>Kelompok Jabatan</b>	:	Jabatan Administrasi
<b>Urusan Pemerintah</b>	:	Ketentraman dan Ketertiban Umum Serta Perlindungan Masyarakat
<b>Kode Jabatan</b>	:	

I. IKHTISAR JABATAN			
<b>Ikhtisar Jabatan</b>	Memimpin dan melaksanakan perumusan kebijakan teknis, memberikan dukungan atas penyelenggaraan urusan Pemerintahan Daerah, membina, mengoordinasikan dan melaksanakan program dan kegiatan dibidang kedaruratan dan logistik sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan		
II. STANDAR KOMPETENSI			
Kompetensi	Level	Deskripsi	Indikator Kompetensi
A. Manajerial			
1. <b>Integritas</b>	3	Mampu memastikan, menanamkan keyakinan bersama agar anggota yang dipimpin bertindak sesuai nilai, norma, dan etika organisasi, dalam lingkup formal	3.1 Memastikan anggota yang dipimpin bertindak sesuai dengan nilai, norma, dan etika organisasi dalam segala situasi dan kondisi 3.2 Mampu untuk memberi apresiasi dan teguran bagi anggota yang dipimpin agar bertindak selaras dengan nilai, norma, dan etika organisasi dalam segala situasi dan kondisi 3.3 Melakukan monitoring dan evaluasi terhadap penerapan sikap integritas di dalam unit kerja yang dipimpin
2. <b>Kerjasama</b>	3	Efektif membangun tim kerja untuk peningkatan kinerja organisasi	3.1. Melihat kekuatan/kelemahan anggota tim, membentuk tim yang tepat, mengantisipasi kemungkinan hambatan, dan mencari solusi yang optimal 3.2. Mengupayakan dan mengutamakan pengambilan keputusan berdasarkan usulan-usulan anggota tim/kelompok, bernegosiasi secara efektif untuk upaya penyelesaian pekerjaan yang menjadi target kinerja kelompok dan/atau unit kerja 3.3. Membangun aliansi dengan para pemangku kepentingan dalam rangka mendukung penyelesaian target kerja kelompok
3. <b>Komunikasi</b>	3	Berkomunikasi secara asertif, terampil berkomunikasi lisan/ tertulis untuk	3.1 Menyampaikan suatu informasi yang sensitif/rumit dengan cara penyampaian dan kondisi yang tepat, sehingga dapat dipahami dan

		menyampaikan informasi yang sensitif/ rumit/ kompleks	diterima oleh pihak lain 3.2. Menyederhanakan topik yang rumit dan sensitif sehingga lebih mudah dipahami dan diterima orang lain 3.3. Membuat laporan tahunan/periodik/naskah/dokumen/proposal yang kompleks; Membuat surat resmi yang sistematis dan tidak menimbulkan pemahaman yang berbeda; membuat proposal yang rinci dan lengkap
<b>4. Orientasi pada Hasil</b>	3	Menetapkan target kerja yang menantang bagi unit kerja, memberi apresiasi dan teguran untuk mendorong kinerja	3.1. Menetapkan target kinerja unit yang lebih tinggi dari target yang ditetapkan organisasi 3.2. Memberikan apresiasi dan teguran untuk mendorong pencapaian hasil unit kerjanya 3.3. Mengembangkan metode kerja yang lebih efektif dan efisien untuk mencapai target kerja unitnya
<b>5. Pelayanan Publik</b>	3	Mampu memanfaatkan kekuatan kelompok serta memperbaiki standar pelayanan publik di lingkup unit kerja	3.1. Memahami, mendeskripsikan pengaruh dan hubungan/kekuatan kelompok yang sedang berjalan di organisasi (aliansi atau persaingan), dan dampaknya terhadap unit kerja untuk menjalankan tugas pemerintahan secara profesional dan netral, tidak memihak 3.2. Menggunakan keterampilan dan pemahaman lintas organisasi untuk secara efektif memfasilitasi kebutuhan kelompok yang lebih besar dengan cara-cara yang mengikuti standar objektif, transparan, profesional, sehingga tidak merugikan para pihak di lingkup pelayanan publik unit kerjanya 3.3. Mengimplementasikan cara-cara yang efektif untuk memantau dan mengevaluasi masalah yang dihadapi pemangku kepentingan/masyarakat serta mengantisipasi kebutuhan mereka saat menjalankan tugas pelayanan publik di unit kerjanya
<b>6. Pengembangan Diri dan Orang Lain</b>	3	Memberikan umpan balik, membimbing	3.1. Memberikan tugas-tugas yang menantang pada bawahan sebagai media belajar untuk mengembangkan kemampuannya

			<p>3.2. Mengamati bawahan dalam mengerjakan tugasnya dan memberikan umpan balik yang objektif dan jujur; melakukan diskusi dengan bawahan untuk memberikan bimbingan dan umpan balik yang berguna bagi bawahan</p> <p>3.3. Mendorong kepercayaan diri bawahan; memberikan kepercayaan penuh pada bawahan untuk mengerjakan tugas dengan caranya sendiri; memberi kesempatan dan membantu bawahan menemukan peluang untuk berkembang</p>
<b>7. Mengelola Perubahan</b>	3	Membantu orang lain mengikuti perubahan, mengantisipasi perubahan secara tepat	<p>3.1. Membantu orang lain dalam melakukan perubahan</p> <p>3.2. Menyesuaikan prioritas kerja secara berulang-ulang jika diperlukan</p> <p>3.3. Mengantisipasi perubahan yang dibutuhkan oleh unit kerjanya secara tepat. Memberikan solusi efektif terhadap masalah yang ditimbulkan oleh adanya perubahan</p>
<b>8. Pengambilan Keputusan</b>	3	Membandingkan berbagai alternatif, menyeimbangkan risiko keberhasilan dalam implementasi	<p>3.1. Membandingkan berbagai alternatif tindakan dan implikasinya</p> <p>3.2. Memilih alternatif solusi yang terbaik, membuat keputusan operasional mengacu pada alternatif solusi terbaik yang didasarkan pada analisis data yang sistematis, seksama, mengikuti prinsip kehati-hatian</p> <p>3.3. Menyeimbangkan antara kemungkinan risiko dan keberhasilan dalam implementasinya</p>
<b>B. Sosial Kultural</b>			
<b>9. Perekat Bangsa</b>	3	Mempromosikan, mengembangkan sikap toleransi dan persatuan	<p>3.1. Mempromosikan sikap menghargai perbedaan di antara orang-orang yang mendorong toleransi dan keterbukaan</p> <p>3.2. Melakukan pemetaan sosial di masyarakat sehingga dapat memberikan respon yang sesuai dengan budaya yang berlaku. Mengidentifikasi potensi kesalahpahaman yang diakibatkan adanya keragaman budaya yang ada</p> <p>3.3. Menjadi mediator untuk menyelesaikan konflik atau</p>

			mengurangi dampak negatif dari konflik atau potensi konflik
<b>C. Teknis</b>			
<b>10. Advokasi Kebijakan Otonomi Daerah</b>	3	Mampu menyelenggarakan <b>advokasi kebijakan otonomi daerah</b>	<p>3.1 Mampu menyusun instrumen, materi, dan kelengkapan pelaksanaan <b>advokasi kebijakan otonomi daerah</b>.</p> <p>3.2 Mampu mengembangkan serta menjalankan strategi atau intervensi advokasi dalam mengatasi hambatan sistemik dan resistensi pemangku kepentingan dalam menerapkan kebijakan otonomi daerah</p> <p>3.3 Mampu mengimplementasikan strategi advokasi dengan target dan waktu yang terukur dan terencana dengan mendapatkan hasil sesuai yang diharapkan</p>
<b>11. Advokasi Kebijakan Ketentraman dan Ketertiban umum serta Perlindungan Masyarakat</b>	3	Mampu mengidentifikasi Prinsip-prinsip teori dan praktek tanpa bantuan atau pengawasan langsung tentang pengembangan <b>Advokasi Kebijakan Ketentraman dan Ketertiban umum serta Perlindungan Masyarakat</b> Strategis yang dimiliki oleh organisasi dengan menggunakan metode yang sistematis.	<p>3.1 Menguasai pengetahuan dan keterampilan tentang <b>Advokasi Kebijakan Ketentraman dan Ketertiban umum serta Perlindungan Masyarakat</b> dalam rangka tercapainya tujuan visi dan misi organisasi dengan mengikuti pelatihan tingkat menengah</p> <p>3.2 Mampu melakukan tugas <b>Advokasi Kebijakan Ketentraman dan Ketertiban umum serta Perlindungan Masyarakat</b> secara spesifik dan menganalisis informasi untuk menyelesaikan permasalahan yang timbul dalam tugas</p> <p>3.3 Mampu menganalisa proses pelaksanaan <b>Advokasi Kebijakan Ketentraman dan Ketertiban umum serta Perlindungan Masyarakat</b> tanpa bantuan atau pengawasan langsung dengan kecepatan dan penyelesaian yang lebih tepat</p>
<b>12. Penanganan Darurat</b>	3	Mampu mengidentifikasi Prinsip-prinsip teori dan praktek tanpa bantuan atau pengawasan	<p>3.1 Menguasai pengetahuan dan keterampilan tentang <b>Penanganan Darurat</b> dalam rangka tercapainya tujuan visi dan misi organisasi dengan mengikuti pelatihan tingkat menengah</p>

		langsung tentang <b>Penanganan Darurat</b> yang dimiliki oleh organisasi dengan menggunakan metode yang sistematis.	3.2 Mampu melakukan tugas <b>Penanganan Darurat</b> secara spesifik dan menganalisis informasi untuk menyelesaikan permasalahan yang timbul dalam tugas 3.3 Mampu menganalisa proses pelaksanaan <b>Penanganan Darurat</b> tanpa bantuan atau pengawasan langsung dengan kecepatan dan penyelesaian yang lebih tepat
13. <b>Pengelolaan Distribusi Logistik</b>	3	Mampu mengidentifikasi Prinsip-prinsip teori dan praktek tanpa bantuan atau pengawasan langsung tentang <b>Pengelolaan Distribusi Logistik</b> yang dimiliki oleh organisasi dengan menggunakan metode yang sistematis.	3.1 Menguasai pengetahuan dan keterampilan tentang <b>Pengelolaan Distribusi Logistik</b> dalam rangka tercapainya tujuan visi dan misi organisasi dengan mengikuti pelatihan tingkat menengah 3.2 Mampu melakukan tugas <b>Pengelolaan Distribusi Logistik</b> secara spesifik dan menganalisis informasi untuk menyelesaikan permasalahan yang timbul dalam tugas 3.3 Mampu menganalisa proses pelaksanaan <b>Pengelolaan Distribusi Logistik</b> tanpa bantuan atau pengawasan langsung dengan kecepatan dan penyelesaian yang lebih tepat
14. <b>Perumusan Kebijakan Teknis</b>	3	Mampu mengidentifikasi Prinsip-prinsip teori dan praktek tanpa bantuan atau pengawasan langsung tentang <b>Perumusan Kebijakan Teknis</b> di organisasi yang dimiliki oleh organisasi dengan menggunakan metode yang sistematis.	3.1 Menguasai pengetahuan dan keterampilan tentang <b>Perumusan Kebijakan Teknis</b> di organisasi dalam rangka tercapainya tujuan visi dan misi organisasi dengan mengikuti pelatihan tingkat menengah 3.2 Mampu melakukan tugas <b>Perumusan Kebijakan Teknis</b> di organisasi secara spesifik dan menganalisis informasi untuk menyelesaikan permasalahan yang timbul dalam tugas 3.3 Mampu menganalisa proses pelaksanaan <b>Perumusan Kebijakan Teknis</b> di organisasi tanpa bantuan atau pengawasan langsung dengan kecepatan dan penyelesaian yang lebih tepat
15. <b>Merencanakan,</b>	3	Mampu	3.1 Menguasai pengetahuan dan

<b>Mengevaluasi dan Penyusunan Laporan Bidang Kedaruratan dan Logistik</b>	mengidentifikasi Prinsip-prinsip teori dan praktek tanpa bantuan atau pengawasan langsung tentang <b>Merencanakan, Mengevaluasi dan Penyusunan Laporan Bidang Kedaruratan dan Logistik</b> yang dimiliki oleh organisasi dengan menggunakan metode yang sistematis.	keterampilan tentang <b>Merencanakan, Mengevaluasi dan Penyusunan Laporan Bidang Kedaruratan dan Logistik</b> dalam rangka tercapainya tujuan visi dan misi organisasi dengan mengikuti pelatihan tingkat menengah 3.2 Mampu melakukan tugas <b>Merencanakan, Mengevaluasi dan Penyusunan Laporan Bidang Kedaruratan dan Logistik</b> secara spesifik dan menganalisis informasi untuk menyelesaikan permasalahan yang timbul dalam tugas 3.3 Mampu menganalisa proses pelaksanaan <b>Merencanakan, Mengevaluasi dan Penyusunan Laporan Bidang Kedaruratan dan Logistik</b> tanpa bantuan atau pengawasan langsung dengan kecepatan dan penyelesaian yang lebih tepat
--	---	---

<b>III. Persyaratan Jabatan</b>						
<b>Jenis Persyaratan</b>		<b>Uraian</b>		<b>Tingkat Pentingnya terhadap Jabatan</b>		
				<b>Mutlak</b>	<b>Penting</b>	<b>Perlu</b>
<b>A. Pendidikan</b>	1. Jenjang 2. Bidang Ilmu	Memiliki kualifikasi pendidikan paling rendah Sarjana atau Diploma IV Sarjana/Bidang Psikologi Umum, Bidang Hubungan Internasional, Psikologi Masyarakat, Manajemen, Sosiologi, administrasi, dan bidang yang relevan dengan tugas Jabatan				
<b>B. Pelatihan</b>	1. Manajerial 2. Teknis 3. Fungsional	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Pelatihan Kepemimpinan Administrator</li> <li>- Diklat Teknis Kedaruratan dan Logistik</li> <li>- Diklat Manajemen Logistik dan Peralatan Penanggulangan Bencana</li> <li>- Diklat Pemerintahan Daerah</li> <li>- Diklat Penanganan Bencana Alam</li> <li>- Diklat Pelatihan Dasar Manajemen Penanggulangan Bencana</li> </ul>	√	√  √  √  √  √		
<b>C. Pengalaman Kerja</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Memiliki pengalaman dalam Jabatan pelaksana paling singkat 4 (empat) tahun atau JF yang setingkat</li> </ul>	√				

	<p>dengan Jabatan pelaksana sesuai dengan bidang tugas Jabatan yang akan diduduki.</p> <p>- Memiliki integritas dan moralitas yang baik.</p>	√		
<b>D. Pangkat</b>	Penata Tk. I / III.d			
<b>E. Indikator Kinerja Jabatan</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Kualitas perumusan kebijakan teknis</li> <li>2. Optimalisasi penyelenggaraan urusan Pemerintahan Daerah</li> <li>3. Optimalisasi Penyusunan Rencana dan Program</li> <li>4. Optimalisasi pelaksanaan program dan kegiatan dibidang Kedaruratan dan Logistik</li> </ol>			

## STANDAR KOMPETENSI JABATAN ASN

**Nama Jabatan** : Bidang Rehabilitasi dan Rekonstruksi  
**Kelompok Jabatan** : Jabatan Administrasi  
**Urusan Pemerintah** : Ketentraman dan Ketertiban Umum Serta Perlindungan Masyarakat  
**Kode Jabatan** :

I. IKHTISAR JABATAN			
<b>Ikhtisar Jabatan</b>	Memimpin dan melaksanakan perumusan kebijakan teknis, memberikan dukungan atas penyelenggaraan urusan Pemerintahan Daerah, membina, mengoordinasikan dan melaksanakan program dan kegiatan dibidang rehabilitasi dan rekonstruksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan		
II. STANDAR KOMPETENSI			
Kompetensi	Level	Deskripsi	Indikator Kompetensi
A. Manajerial			
1. <b>Integritas</b>	3	Mampu memastikan, menanamkan keyakinan bersama agar anggota yang dipimpin bertindak sesuai nilai, norma, dan etika organisasi, dalam lingkup formal	3.1 Memastikan anggota yang dipimpin bertindak sesuai dengan nilai, norma, dan etika organisasi dalam segala situasi dan kondisi 3.2 Mampu untuk memberi apresiasi dan teguran bagi anggota yang dipimpin agar bertindak selaras dengan nilai, norma, dan etika organisasi dalam segala situasi dan kondisi 3.3 Melakukan monitoring dan evaluasi terhadap penerapan sikap integritas di dalam unit kerja yang dipimpin
2. <b>Kerjasama</b>	3	Efektif membangun tim kerja untuk peningkatan kinerja organisasi	3.1. Melihat kekuatan/kelemahan anggota tim, membentuk tim yang tepat, mengantisipasi kemungkinan hambatan, dan mencari solusi yang optimal 3.2. Mengupayakan dan mengutamakan pengambilan keputusan berdasarkan usulan-usulan anggota tim/kelompok, bernegosiasi secara efektif untuk upaya penyelesaian pekerjaan yang menjadi target kinerja kelompok dan/atau unit kerja 3.3. Membangun aliansi dengan para pemangku kepentingan dalam rangka mendukung penyelesaian target kerja kelompok
3. <b>Komunikasi</b>	3	Berkomunikasi secara asertif, terampil berkomunikasi lisan/ tertulis untuk	3.1 Menyampaikan suatu informasi yang sensitif/rumit dengan cara penyampaian dan kondisi yang tepat, sehingga dapat dipahami dan

		menyampaikan informasi yang sensitif/ rumit/ kompleks	diterima oleh pihak lain 3.2. Menyederhanakan topik yang rumit dan sensitif sehingga lebih mudah dipahami dan diterima orang lain 3.3. Membuat laporan tahunan/periodik/naskah/dokumen/proposal yang kompleks; Membuat surat resmi yang sistematis dan tidak menimbulkan pemahaman yang berbeda; membuat proposal yang rinci dan lengkap
<b>4. Orientasi pada Hasil</b>	3	Menetapkan target kerja yang menantang bagi unit kerja, memberi apresiasi dan teguran untuk mendorong kinerja	3.1. Menetapkan target kinerja unit yang lebih tinggi dari target yang ditetapkan organisasi 3.2. Memberikan apresiasi dan teguran untuk mendorong pencapaian hasil unit kerjanya 3.3. Mengembangkan metode kerja yang lebih efektif dan efisien untuk mencapai target kerja unitnya
<b>5. Pelayanan Publik</b>	3	Mampu memanfaatkan kekuatan kelompok serta memperbaiki standar pelayanan publik di lingkup unit kerja	3.1. Memahami, mendeskripsikan pengaruh dan hubungan/kekuatan kelompok yang sedang berjalan di organisasi (aliansi atau persaingan), dan dampaknya terhadap unit kerja untuk menjalankan tugas pemerintahan secara profesional dan netral, tidak memihak 3.2. Menggunakan keterampilan dan pemahaman lintas organisasi untuk secara efektif memfasilitasi kebutuhan kelompok yang lebih besar dengan cara-cara yang mengikuti standar objektif, transparan, profesional, sehingga tidak merugikan para pihak di lingkup pelayanan publik unit kerjanya 3.3. Mengimplementasikan cara-cara yang efektif untuk memantau dan mengevaluasi masalah yang dihadapi pemangku kepentingan/masyarakat serta mengantisipasi kebutuhan mereka saat menjalankan tugas pelayanan publik di unit kerjanya
<b>6. Pengembangan Diri dan Orang Lain</b>	3	Memberikan umpan balik, membimbing	3.1. Memberikan tugas-tugas yang menantang pada bawahan sebagai media belajar untuk mengembangkan kemampuannya

			<p>3.2. Mengamati bawahan dalam mengerjakan tugasnya dan memberikan umpan balik yang objektif dan jujur; melakukan diskusi dengan bawahan untuk memberikan bimbingan dan umpan balik yang berguna bagi bawahan</p> <p>3.3. Mendorong kepercayaan diri bawahan; memberikan kepercayaan penuh pada bawahan untuk mengerjakan tugas dengan caranya sendiri; memberi kesempatan dan membantu bawahan menemukan peluang untuk berkembang</p>
<b>7. Mengelola Perubahan</b>	3	Membantu orang lain mengikuti perubahan, mengantisipasi perubahan secara tepat	<p>3.1. Membantu orang lain dalam melakukan perubahan</p> <p>3.2. Menyesuaikan prioritas kerja secara berulang-ulang jika diperlukan</p> <p>3.3. Mengantisipasi perubahan yang dibutuhkan oleh unit kerjanya secara tepat. Memberikan solusi efektif terhadap masalah yang ditimbulkan oleh adanya perubahan</p>
<b>8. Pengambilan Keputusan</b>	3	Membandingkan berbagai alternatif, menyeimbangkan risiko keberhasilan dalam implementasi	<p>3.1. Membandingkan berbagai alternatif tindakan dan implikasinya</p> <p>3.2. Memilih alternatif solusi yang terbaik, membuat keputusan operasional mengacu pada alternatif solusi terbaik yang didasarkan pada analisis data yang sistematis, seksama, mengikuti prinsip kehati-hatian</p> <p>3.3. Menyeimbangkan antara kemungkinan risiko dan keberhasilan dalam implementasinya</p>
<b>B. Sosial Kultural</b>			
<b>9. Perekat Bangsa</b>	3	Mempromosikan, mengembangkan sikap toleransi dan persatuan	<p>3.1. Mempromosikan sikap menghargai perbedaan di antara orang-orang yang mendorong toleransi dan keterbukaan</p> <p>3.2. Melakukan pemetaan sosial di masyarakat sehingga dapat memberikan respon yang sesuai dengan budaya yang berlaku. Mengidentifikasi potensi kesalahpahaman yang diakibatkan adanya keragaman budaya yang ada</p> <p>3.3. Menjadi mediator untuk menyelesaikan konflik atau</p>

			mengurangi dampak negatif dari konflik atau potensi konflik
<b>C. Teknis</b>			
<b>10. Advokasi Kebijakan Otonomi Daerah</b>	3	Mampu menyelenggarakan <b>advokasi kebijakan otonomi daerah</b>	<p>3.1 Mampu menyusun instrumen, materi, dan kelengkapan pelaksanaan <b>advokasi kebijakan otonomi daerah</b>.</p> <p>3.2 Mampu mengembangkan serta menjalankan strategi atau intervensi advokasi dalam mengatasi hambatan sistemik dan resistensi pemangku kepentingan dalam menerapkan kebijakan otonomi daerah</p> <p>3.3 Mampu mengimplementasikan strategi advokasi dengan target dan waktu yang terukur dan terencana dengan mendapatkan hasil sesuai yang diharapkan</p>
<b>11. Advokasi Kebijakan Ketentraman dan Ketertiban umum serta Perlindungan Masyarakat</b>	3	Mampu mengidentifikasi Prinsip-prinsip teori dan praktek tanpa bantuan atau pengawasan langsung tentang pengembangan <b>Advokasi Kebijakan Ketentraman dan Ketertiban umum serta Perlindungan Masyarakat</b> Strategis yang dimiliki oleh organisasi dengan menggunakan metode yang sistematis.	<p>3.1 Menguasai pengetahuan dan keterampilan tentang <b>Advokasi Kebijakan Ketentraman dan Ketertiban umum serta Perlindungan Masyarakat</b> dalam rangka tercapainya tujuan visi dan misi organisasi dengan mengikuti pelatihan tingkat menengah</p> <p>3.2 Mampu melakukan tugas <b>Advokasi Kebijakan Ketentraman dan Ketertiban umum serta Perlindungan Masyarakat</b> secara spesifik dan menganalisis informasi untuk menyelesaikan permasalahan yang timbul dalam tugas</p> <p>3.3 Mampu menganalisa proses pelaksanaan <b>Advokasi Kebijakan Ketentraman dan Ketertiban umum serta Perlindungan Masyarakat</b> tanpa bantuan atau pengawasan langsung dengan kecepatan dan penyelesaian yang lebih tepat</p>
<b>12. Rehabilitasi dan Rekonstruksi</b>	3	Mampu mengidentifikasi Prinsip-prinsip teori dan praktek tanpa bantuan atau pengawasan	<p>3.1 Menguasai pengetahuan dan keterampilan tentang <b>Rehabilitasi dan Rekonstruksi</b> dalam rangka tercapainya tujuan visi dan misi organisasi dengan mengikuti pelatihan tingkat menengah</p>

		langsung tentang <b>Rehabilitasi dan Rekonstruksi</b> yang dimiliki oleh organisasi dengan menggunakan metode yang sistematis.	3.2 Mampu melakukan tugas <b>Rehabilitasi dan Rekonstruksi</b> secara spesifik dan menganalisis informasi untuk menyelesaikan permasalahan yang timbul dalam tugas 3.3 Mampu menganalisa proses pelaksanaan <b>Rehabilitasi dan Rekonstruksi</b> tanpa bantuan atau pengawasan langsung dengan kecepatan dan penyelesaian yang lebih tepat
13. <b>Perumusan kebijakan teknis</b>	3	Mampu mengidentifikasi Prinsip-prinsip teori dan praktek tanpa bantuan atau pengawasan langsung tentang <b>Perumusan kebijakan teknis</b> yang dimiliki oleh organisasi dengan menggunakan metode yang sistematis.	3.1 Menguasai pengetahuan dan keterampilan tentang <b>Perumusan kebijakan teknis</b> dalam rangka tercapainya tujuan visi dan misi organisasi dengan mengikuti pelatihan tingkat menengah 3.2 Mampu melakukan tugas <b>Perumusan kebijakan teknis</b> secara spesifik dan menganalisis informasi untuk menyelesaikan permasalahan yang timbul dalam tugas 3.3 Mampu menganalisa proses pelaksanaan <b>Perumusan kebijakan teknis</b> tanpa bantuan atau pengawasan langsung dengan kecepatan dan penyelesaian yang lebih tepat
14. <b>Dukungan atas penyelenggaraan urusan Pemerintahan Daerah</b>	3	Mampu mengidentifikasi Prinsip-prinsip teori dan praktek tanpa bantuan atau pengawasan langsung tentang <b>Dukungan atas penyelenggaraan urusan Pemerintahan Daerah</b> di organisasi yang dimiliki oleh organisasi dengan menggunakan metode yang sistematis.	3.1 Menguasai pengetahuan dan keterampilan tentang <b>Dukungan atas penyelenggaraan urusan Pemerintahan Daerah</b> di organisasi dalam rangka tercapainya tujuan visi dan misi organisasi dengan mengikuti pelatihan tingkat menengah 3.2 Mampu melakukan tugas <b>Dukungan atas penyelenggaraan urusan Pemerintahan Daerah</b> di organisasi secara spesifik dan menganalisis informasi untuk menyelesaikan permasalahan yang timbul dalam tugas 3.3 Mampu menganalisa proses pelaksanaan <b>Dukungan atas penyelenggaraan urusan Pemerintahan Daerah</b> di organisasi tanpa bantuan atau

			pengawasan langsung dengan kecepatan dan penyelesaian yang lebih tepat
15. <b>Pembinaan, pengkoordinasian dan melaksanakan program dan kegiatan</b>	3	Mampu mengidentifikasi Prinsip-prinsip teori dan praktek tanpa bantuan atau pengawasan langsung tentang <b>Pembinaan, pengkoordinasian dan melaksanakan program dan kegiatan</b> yang dimiliki oleh organisasi dengan menggunakan metode yang sistematis.	<p>3.1 Menguasai pengetahuan dan keterampilan tentang <b>Pembinaan, pengkoordinasian dan melaksanakan program dan kegiatan</b> dalam rangka tercapainya tujuan visi dan misi organisasi dengan mengikuti pelatihan tingkat menengah</p> <p>3.2 Mampu melakukan tugas <b>Pembinaan, pengkoordinasian dan melaksanakan program dan kegiatan</b> secara spesifik dan menganalisis informasi untuk menyelesaikan permasalahan yang timbul dalam tugas</p> <p>3.3 Mampu menganalisa proses pelaksanaan <b>Pembinaan, pengkoordinasian dan melaksanakan program dan kegiatan</b> tanpa bantuan atau pengawasan langsung dengan kecepatan dan penyelesaian yang lebih tepat</p>

### III. Persyaratan Jabatan

Jenis Persyaratan		Uraian	Tingkat Pentingnya terhadap Jabatan		
			Mutlak	Penting	Perlu
<b>A. Pendidikan</b>	1. Jenjang	Memiliki kualifikasi pendidikan paling rendah Sarjana atau Diploma IV			
	2. Bidang Ilmu	Sarjana/ Teknik Geologi, Psikologi umum, Manajemen, Sosiologi, Bidang Ekonomi, Hukum, Studi Pembangunan, kebijakan Publik, Teknik Lingkungan, Teknik Sipil, Planologi, Bidang Hubungan Internasional, dan bidang yang relevan dengan tugas Jabatan			
<b>B. Pelatihan</b>	1. Manajerial	- Pelatihan Kepemimpinan Administrator	√		
	2. Teknis	- Diklat Teknis Rehabilitasi dan Rekonstruksi		√	
		- Diklat Manajemen Bencana Tingkat Lanjut		√	
- Diklat Pemerintahan Daerah			√		
- Diklat Penanganan Bencana Alam			√		
	- Diklat Pelatihan Dasar Manajemen Rehabilitasi & Rekonstruksi		√		
	3. Fungsional				
<b>C. Pengalaman Kerja</b>		- Memiliki pengalaman dalam	√		

	<p>Jabatan pelaksana paling singkat 4 (empat) tahun atau JF yang setingkat dengan Jabatan pelaksana sesuai dengan bidang tugas Jabatan yang akan diduduki.</p> <p>- Memiliki integritas dan moralitas yang baik.</p>	√		
<b>D. Pangkat</b>	Penata Tk. I / III.d			
<b>E. Indikator Kinerja Jabatan</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Kualitas perumusan kebijakan teknis</li> <li>2. Optimalisasi penyelenggaraan urusan Pemerintahan Daerah</li> <li>3. Optimalisasi Penyusunan Rencana dan Program</li> <li>4. Optimalisasi pelaksanaan program dan kegiatan dibidang Rehabilitasi dan Rekonstruksi</li> </ol>			

# Pemerintah Kabupaten Luwu Timur Tahun 2023

## STANDAR KOMPETENSI JABATAN ASN

Nama Jabatan	:	Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian
Kelompok Jabatan	:	Administrasi
Urusan Pemerintah	:	Ketentraman dan Ketertiban Umum Serta Perlindungan Masyarakat
Kode Jabatan	:	

I. IKHTISAR JABATAN			
Ikhtisar Jabatan	Memimpin dan melaksanakan urusan ketatausahaan, administrasi pengadaan, pemeliharaan dan penghapusan barang, urusan rumah tangga serta mengelola administrasi kepegawaian sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.		
II. STANDAR KOMPETENSI			
Kompetensi	Level	Deskripsi	Indikator Kompetensi
A. Manajerial			
1. Integritas	2	Mampu memastikan, menanamkan keyakinan bersama agar anggota yang dipimpin bertindak sesuai nilai, norma, dan etika organisasi, dalam lingkup formal	2.1 Memastikan anggota yang dipimpin bertindak sesuai dengan nilai, norma, dan etika organisasi dalam segala situasi dan kondisi 2.2 Mampu untuk memberi apresiasi dan teguran bagi anggota yang dipimpin agar bertindak selaras dengan nilai, norma, dan etika organisasi dalam segala situasi dan kondisi 2.3 Melakukan monitoring dan evaluasi terhadap penerapan sikap integritas di dalam unit kerja yang dipimpin
2. Kerjasama	2	Menumbuhkan tim kerja yang partisipatif dan efektif	2.1. Membantu orang lain dalam menyelesaikan tugas-tugas mereka untuk mendukung sasaran tim 2.2. Berbagi informasi yang relevan atau bermanfaat pada anggota tim; mempertimbangkan masukan dan keahlian anggota dalam tim/kelompok kerja serta bersedia untuk belajar dari orang lain 2.3. Membangun komitmen yang tinggi untuk menyelesaikan tugas tim
3. Komunikasi	2	Aktif menjalankan komunikasi secara	2.1 Menggunakan gaya komunikasi informal untuk

# Pemerintah Kabupaten Luwu Timur Tahun 2023

		formal dan informal; Bersedia mendengarkan orang lain, menginterpretasikan pesan dengan respon yang sesuai, mampu menyusun materi presentasi, pidato, naskah, laporan, dll	meningkatkan hubungan profesional 2.2. Mendengarkan pihak lain secara aktif; menangkap dan menginterpretasikan pesan-pesan dari orang lain, serta memberikan respon yang sesuai 2.3. Membuat materi presentasi, pidato, draft naskah, laporan dll sesuai arahan pimpinan
4. Orientasi pada Hasil	2	Berupaya meningkatkan hasil kerja pribadi yang lebih tinggi dari standar yang ditetapkan, mencari, mencoba metode alternatif untuk peningkatan kinerja	2.1. Menetapkan dan berupaya mencapai standar kerja pribadi yang lebih tinggi dari standar kerja yang ditetapkan organisasi 2.2. Mencari, mencoba metode kerja alternatif untuk meningkatkan hasil kerjanya 2.3. memberi contoh kepada orang-orang unit kerjanya untuk mencoba menerapkan metode kerja yang lebih efektif yang sudah dilakukannya
5. Pelayanan Publik	2	Mampu mensupervisi/mengawasi/menyelia dan menjelaskan proses pelaksanaan tugas tugas pemerintahan/pelayanan publik secara transparan	2.1. Menunjukkan sikap yakin dalam mengerjakan tugas-tugas pemerintahan/pelayanan publik, mampu menyelia dan menjelaskan secara obyektif bila ada yang mempertanyakan kebijakan yang diambil 2.2. Secara aktif mencari informasi untuk mengenali kebutuhan pemangku kepentingan agar dapat menjalankan pelaksanaan tugas pemerintahan, pembangunan dan pelayanan publik secara cepat dan tanggap 2.3. Mampu mengenali dan memanfaatkan kebiasaan, tatacara, situasi tertentu sehingga apa yang disampaikan menjadi perhatian pemangku kepentingan dalam hal penyelesaian tugas-tugas pemerintahan, pembangunan dan pelayanan publik

# Pemerintah Kabupaten Luwu Timur Tahun 2023

6. Pengembangan Diri dan Orang Lain	2	Meningkatkan kemampuan bawahan dengan memberikan contoh dan penjelasan cara melaksanakan suatu pekerjaan	<ul style="list-style-type: none"> <li>2.1. Meningkatkan kemampuan bawahan dengan memberikan contoh, instruksi, penjelasan dan petunjuk praktis yang jelas kepada bawahan dalam menyelesaikan suatu pekerjaan</li> <li>2.2. Membantu bawahan untuk mempelajari proses, program atau sistem baru</li> <li>2.3. Menggunakan metode lain untuk meyakinkan bahwa orang lain telah memahami penjelasan atau pengarahan</li> </ul>
7. Mengelola Perubahan	2	Proaktif beradaptasi mengikuti perubahan	<ul style="list-style-type: none"> <li>2.1. Menyesuaikan cara kerja lama dengan menerapkan metode/proses baru selaras dengan ketentuan yang berlaku tanpa arahan orang lain</li> <li>2.2. Mengembangkan kemampuan diri untuk menghadapi perubahan</li> <li>2.3. Cepat dan tanggap dalam menerima perubahan</li> </ul>
8. Pengambilan Keputusan	2	Menganalisis masalah secara mendalam	<ul style="list-style-type: none"> <li>2.1. Melakukan analisis secara mendalam terhadap informasi yang tersedia dalam upaya mencari solusi</li> <li>2.2. Mempertimbangkan berbagai alternatif yang ada sebelum membuat</li> <li>2.3. Membuat keputusan operasional berdasarkan kesimpulan dari berbagai sumber informasi sesuai dengan pedoman yang ada</li> </ul>
<b>B. Sosial Kultural</b>			
9. Perekat Bangsa	2	Aktif mengembangkan sikap saling menghargai, menekankan persamaan dan persatuan	<ul style="list-style-type: none"> <li>2.1 menampilkan sikap dan perilaku yang peduli akan nilai-nilai keberagaman dan menghargai perbedaan</li> <li>2.2 Membangun hubungan baik antar individu dalam organisasi, mitra kerja, pemangku kepentingan</li> <li>2.3 Bersikap tenang, mampu mengendalikan emosi, kemarahan dan frustrasi dalam</li> </ul>

# Pemerintah Kabupaten Luwu Timur Tahun 2023

			menghadapi pertentangan yang ditimbulkan oleh perbedaan latar belakang, agama/kepercayaan, suku, jender, sosial ekonomi, preferensi politik di lingkungan unit kerjanya
<b>C. Teknis</b>			
10. Advokasi Kebijakan Otonomi Daerah	2	Mampu melaksanakan pengelolaan <b>Advokasi Kebijakan Otonomi Daerah</b> sesuai pedoman kerja/petunjuk teknis	2.1 Mampu Menyusun rencana pengelolaan <b>Advokasi Kebijakan Otonomi Daerah</b> 2.2 Mampu melaksanakan pengelolaan <b>Advokasi Kebijakan Otonomi Daerah</b> . 2.3 Mampu menjelaskan secara lengkap, rinci dan jelas perihal pengelolaan <b>Advokasi Kebijakan Otonomi Daerah</b> serta Potensinya kepada masyarakat dan stakeholder.
11. Advokasi Kebijakan Ketentraman dan Ketertiban umum serta Perlindungan Masyarakat	2	Mampu melaksanakan pengelolaan <b>Advokasi Kebijakan Ketentraman dan Ketertiban umum serta Perlindungan Masyarakat</b> sesuai pedoman kerja/petunjuk teknis	2.1 Mampu Menyusun rencana pengelolaan <b>Advokasi Kebijakan Ketentraman dan Ketertiban umum serta Perlindungan Masyarakat</b> 2.2 Mampu melaksanakan pengelolaan <b>Advokasi Kebijakan Ketentraman dan Ketertiban umum serta Perlindungan Masyarakat</b> . 2.3 Mampu menjelaskan secara lengkap, rinci dan jelas perihal pengelolaan <b>Advokasi Kebijakan Ketentraman dan Ketertiban umum serta Perlindungan Masyarakat</b> serta Potensinya kepada masyarakat dan stakeholder.
12. Manajemen Perkantoran	2	Mampu melaksanakan pengelolaan <b>Manajemen Perkantoran</b> sesuai pedoman kerja/petunjuk teknis	2.1 Mampu Menyusun rencana pengelolaan <b>Manajemen Perkantoran</b> . 2.2 Mampu melaksanakan pengelolaan <b>Manajemen Perkantoran</b> . 2.3 Mampu menjelaskan secara lengkap, rinci dan jelas perihal pengelolaan <b>Manajemen Perkantoran</b> serta Potensinya

# Pemerintah Kabupaten Luwu Timur Tahun 2023

			kepada masyarakat dan stakeholder.
13. Keprotokoleran	2	Mampu melaksanakan pengelolaan <b>Keprotokoleran</b> sesuai pedoman kerja/petunjuk teknis	2.1 Mampu Menyusun rencana pengelolaan <b>Keprotokoleran</b> . 2.2 Mampu melaksanakan pengelolaan <b>Keprotokoleran</b> . 2.3 Mampu menjelaskan secara lengkap, rinci dan jelas perihal pengelolaan <b>Keprotokoleran</b> serta Potensinya kepada masyarakat dan stakeholder.
14. Manajemen Aset	2	Mampu melaksanakan pengelolaan <b>Manajemen Aset</b> sesuai pedoman kerja/petunjuk teknis	2.1 Mampu Menyusun rencana pengelolaan <b>Manajemen Aset</b> 2.2 Mampu melaksanakan pengelolaan <b>Manajemen Aset</b> . 2.3 Mampu menjelaskan secara lengkap, rinci dan jelas perihal pengelolaan <b>Manajemen Aset</b> serta Potensinya kepada masyarakat dan stakeholder.
15. Administrasi Kepegawaian	2	Mampu melaksanakan pengelolaan <b>Administrasi Kepegawaian</b> sesuai pedoman kerja/petunjuk teknis	2.1 Mampu Menyusun rencana pengelolaan <b>Administrasi Kepegawaian</b> . 2.2 Mampu melaksanakan pengelolaan <b>Administrasi Kepegawaian</b> . 2.3 Mampu menjelaskan secara lengkap, rinci dan jelas perihal pengelolaan <b>Administrasi Kepegawaian</b> serta Potensinya kepada masyarakat dan stakeholder.

### III. Persyaratan Jabatan

Jenis Persyaratan		Uraian	Tingkat Pentingnya terhadap Jabatan		
			Mutlak	Penting	Perlu
A. Pendidikan	1. Jenjang	Memiliki kualifikasi pendidikan paling rendah Sarjana atau Diploma IV			
	2. Bidang Ilmu	Ilmu Sosial/Manajemen/Ekonomi atau bidang yang relevan dengan tugas jabatan			
B. Pelatihan	1. Manajerial	- Pelatihan Kepemimpinan Pengawas - Pelatihan Kepemimpinan Pelaksana	√		
	2. Teknis	- Diklat Terkait Peraturan-peraturan Kepegawaian - Diklat Teknis Analisis Jabatan - Diklat Manajemen Kepegawaian		√	

# Pemerintah Kabupaten Luwu Timur Tahun 2023

		- Diklat Teknis Tata Naskah Dinas - Diklat Kearsipan		√ √	
	3. Fungsional				
<b>C. Pengalaman Kerja</b>		- Memiliki pengalaman dalam Jabatan pelaksana paling singkat 4 (empat) tahun atau JF yang setingkat dengan Jabatan pelaksana sesuai dengan bidang tugas Jabatan yang akan diduduki. - Memiliki integritas dan moralitas yang baik.	√ √		
<b>D. Pangkat</b>	Penata Muda Tk. I / III.b				
<b>E. Indikator Kinerja Jabatan</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Optimalisasi penyiapan bahan penyusunan kebijakan teknis</li> <li>2. Peningkatan kualitas pembinaan dan koordinasi</li> <li>3. Ketepatan pelaksanaan program dan kegiatan administrasi umum dan kepegawaian.</li> </ol>				

# Pemerintah Kabupaten Luwu Timur Tahun 2023

## STANDAR KOMPETENSI JABATAN ASN

Nama Jabatan	:	Kepala Sub Bagian Keuangan
Kelompok Jabatan	:	Administrasi
Urusan Pemerintah	:	Ketentraman dan Ketertiban Umum Serta Perlindungan Masyarakat
Kode Jabatan	:	

I. IKHTISAR JABATAN			
Ikhtisar Jabatan	Memimpin dan melaksanakan penghimpunan bahan dan mengelola administrasi keuangan meliputi penyusunan anggaran, penggunaan, pembukuan, pertanggungjawaban dan pelaporan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.		
II. STANDAR KOMPETENSI			
Kompetensi	Level	Deskripsi	Indikator Kompetensi
A. Manajerial			
1. Integritas	2	Mampu memastikan, menanamkan keyakinan bersama agar anggota yang dipimpin bertindak sesuai nilai, norma, dan etika organisasi, dalam lingkup formal	2.1 Memastikan anggota yang dipimpin bertindak sesuai dengan nilai, norma, dan etika organisasi dalam segala situasi dan kondisi 2.2 Mampu untuk memberi apresiasi dan teguran bagi anggota yang dipimpin agar bertindak selaras dengan nilai, norma, dan etika organisasi dalam segala situasi dan kondisi 2.3 Melakukan monitoring dan evaluasi terhadap penerapan sikap integritas di dalam unit kerja yang dipimpin
2. Kerjasama	2	Menumbuhkan tim kerja yang partisipatif dan efektif	2.1. Membantu orang lain dalam menyelesaikan tugas-tugas mereka untuk mendukung sasaran tim 2.2. Berbagi informasi yang relevan atau bermanfaat pada anggota tim; mempertimbangkan masukan dan keahlian anggota dalam tim/kelompok kerja serta bersedia untuk belajar dari orang lain 2.3. Membangun komitmen yang tinggi untuk menyelesaikan tugas tim
3. Komunikasi	2	Aktif menjalankan komunikasi secara	2.1 Menggunakan gaya komunikasi informal untuk

# Pemerintah Kabupaten Luwu Timur Tahun 2023

		formal dan informal; Bersedia mendengarkan orang lain, menginterpretasikan pesan dengan respon yang sesuai, mampu menyusun materi presentasi, pidato, naskah, laporan, dll	meningkatkan hubungan profesional 2.2. Mendengarkan pihak lain secara aktif; menangkap dan menginterpretasikan pesan-pesan dari orang lain, serta memberikan respon yang sesuai 2.3. Membuat materi presentasi, pidato, draft naskah, laporan dll sesuai arahan pimpinan
4. Orientasi pada Hasil	2	Berupaya meningkatkan hasil kerja pribadi yang lebih tinggi dari standar yang ditetapkan, mencari, mencoba metode alternatif untuk peningkatan kinerja	2.1. Menetapkan dan berupaya mencapai standar kerja pribadi yang lebih tinggi dari standar kerja yang ditetapkan organisasi 2.2. Mencari, mencoba metode kerja alternatif untuk meningkatkan hasil kerjanya 2.3. memberi contoh kepada orang-orang unit kerjanya untuk mencoba menerapkan metode kerja yang lebih efektif yang sudah dilakukannya
5. Pelayanan Publik	2	Mampu mensupervisi/mengawasi/menyelia dan menjelaskan proses pelaksanaan tugas tugas pemerintahan/pelayanan publik secara transparan	2.1. Menunjukkan sikap yakin dalam mengerjakan tugas-tugas pemerintahan/pelayanan publik, mampu menyelia dan menjelaskan secara obyektif bila ada yang mempertanyakan kebijakan yang diambil 2.2. Secara aktif mencari informasi untuk mengenali kebutuhan pemangku kepentingan agar dapat menjalankan pelaksanaan tugas pemerintahan, pembangunan dan pelayanan publik secara cepat dan tanggap 2.3. Mampu mengenali dan memanfaatkan kebiasaan, tatacara, situasi tertentu sehingga apa yang disampaikan menjadi perhatian pemangku kepentingan dalam hal penyelesaian tugas-tugas pemerintahan, pembangunan dan pelayanan publik

# Pemerintah Kabupaten Luwu Timur Tahun 2023

6. Pengembangan Diri dan Orang Lain	2	Meningkatkan kemampuan bawahan dengan memberikan contoh dan penjelasan cara melaksanakan suatu pekerjaan	<ul style="list-style-type: none"> <li>2.1. Meningkatkan kemampuan bawahan dengan memberikan contoh, instruksi, penjelasan dan petunjuk praktis yang jelas kepada bawahan dalam menyelesaikan suatu pekerjaan</li> <li>2.2. Membantu bawahan untuk mempelajari proses, program atau sistem baru</li> <li>2.3. Menggunakan metode lain untuk meyakinkan bahwa orang lain telah memahami penjelasan atau pengarahan</li> </ul>
7. Mengelola Perubahan	2	Proaktif beradaptasi mengikuti perubahan	<ul style="list-style-type: none"> <li>2.1. Menyesuaikan cara kerja lama dengan menerapkan metode/proses baru selaras dengan ketentuan yang berlaku tanpa arahan orang lain</li> <li>2.2. Mengembangkan kemampuan diri untuk menghadapi perubahan</li> <li>2.3. Cepat dan tanggap dalam menerima perubahan</li> </ul>
8. Pengambilan Keputusan	2	Menganalisis masalah secara mendalam	<ul style="list-style-type: none"> <li>2.1. Melakukan analisis secara mendalam terhadap informasi yang tersedia dalam upaya mencari solusi</li> <li>2.2. Mempertimbangkan berbagai alternatif yang ada sebelum membuat</li> <li>2.3. Membuat keputusan operasional berdasarkan kesimpulan dari berbagai sumber informasi sesuai dengan pedoman yang ada</li> </ul>
<b>B. Sosial Kultural</b>			
9. Perekat Bangsa	2	Aktif mengembangkan sikap saling menghargai, menekankan persamaan dan persatuan	<ul style="list-style-type: none"> <li>2.1 menampilkan sikap dan perilaku yang peduli akan nilai-nilai keberagaman dan menghargai perbedaan</li> <li>2.2 Membangun hubungan baik antar individu dalam organisasi, mitra kerja, pemangku kepentingan</li> <li>2.3 Bersikap tenang, mampu mengendalikan emosi, kemarahan dan frustrasi dalam</li> </ul>

# Pemerintah Kabupaten Luwu Timur Tahun 2023

			menghadapi pertentangan yang ditimbulkan oleh perbedaan latar belakang, agama/kepercayaan, suku, jender, sosial ekonomi, preferensi politik di lingkungan unit kerjanya
<b>C. Teknis</b>			
10. Advokasi Kebijakan Otonomi Daerah	2	Mampu melaksanakan pengelolaan <b>Advokasi Kebijakan Otonomi Daerah</b> sesuai pedoman kerja/petunjuk teknis	<p>2.1 Mampu Menyusun rencana pengelolaan <b>Advokasi Kebijakan Otonomi Daerah</b></p> <p>2.2 Mampu melaksanakan pengelolaan <b>Advokasi Kebijakan Otonomi Daerah.</b></p> <p>2.3 Mampu menjelaskan secara lengkap, rinci dan jelas perihal pengelolaan <b>Advokasi Kebijakan Otonomi Daerah</b> serta Potensinya kepada masyarakat dan stakeholder.</p>
11. Advokasi Kebijakan Ketentraman dan Ketertiban umum serta Perlindungan Masyarakat	2	Mampu melaksanakan pengelolaan <b>Advokasi Kebijakan Ketentraman dan Ketertiban umum serta Perlindungan Masyarakat</b> sesuai pedoman kerja/petunjuk teknis	<p>2.1 Mampu Menyusun rencana pengelolaan <b>Advokasi Kebijakan Ketentraman dan Ketertiban umum serta Perlindungan Masyarakat</b></p> <p>2.2 Mampu melaksanakan pengelolaan <b>Advokasi Kebijakan Ketentraman dan Ketertiban umum serta Perlindungan Masyarakat.</b></p> <p>2.3 Mampu menjelaskan secara lengkap, rinci dan jelas perihal pengelolaan <b>Advokasi Kebijakan Ketentraman dan Ketertiban umum serta Perlindungan Masyarakat</b> serta Potensinya kepada masyarakat dan stakeholder.</p>
12. Manajemen Keuangan	2	Mampu melaksanakan pengelolaan <b>Manajemen Keuangan</b> sesuai pedoman kerja/petunjuk teknis	<p>2.1 Mampu Menyusun rencana pengelolaan <b>Manajemen Keuangan.</b></p> <p>2.2 Mampu melaksanakan pengelolaan <b>Manajemen Keuangan.</b></p> <p>2.3 Mampu menjelaskan secara lengkap, rinci dan jelas perihal pengelolaan <b>Manajemen Keuangan</b> serta Potensinya</p>

# Pemerintah Kabupaten Luwu Timur Tahun 2023

			kepada masyarakat dan stakeholder.
13. Verifikasi SPM	2	Mampu melaksanakan pengelolaan <b>Verifikasi SPM</b> sesuai pedoman kerja/petunjuk teknis	2.1 Mampu Menyusun rencana pengelolaan <b>Verifikasi SPM</b> . 2.2 Mampu melaksanakan pengelolaan <b>Verifikasi SPM</b> . 2.3 Mampu menjelaskan secara lengkap, rinci dan jelas perihal pengelolaan <b>Verifikasi SPM</b> serta Potensinya kepada masyarakat dan stakeholder.
14. Pengelolaan Gaji	2	Mampu melaksanakan pengelolaan <b>Pengelolaan Gaji</b> sesuai pedoman kerja/petunjuk teknis	2.1 Mampu Menyusun rencana pengelolaan <b>Pengelolaan Gaji</b> . 2.2 Mampu melaksanakan pengelolaan <b>Pengelolaan Gaji</b> . 2.3 Mampu menjelaskan secara lengkap, rinci dan jelas perihal pengelolaan <b>Pengelolaan Gaji</b> serta Potensinya kepada masyarakat dan stakeholder.
15. Penatausahaan Laporan Keuangan	2	Mampu melaksanakan pengelolaan <b>Penatausahaan Laporan Keuangan</b> sesuai pedoman kerja/petunjuk teknis	2.1 Mampu Menyusun rencana pengelolaan <b>Penatausahaan Laporan Keuangan</b> . 2.2 Mampu melaksanakan pengelolaan <b>Penatausahaan Laporan Keuangan</b> . 2.3 Mampu menjelaskan secara lengkap, rinci dan jelas perihal pengelolaan <b>Penatausahaan Laporan Keuangan</b> serta Potensinya kepada masyarakat dan stakeholder.

### III. Persyaratan Jabatan

Jenis Persyaratan		Uraian	Tingkat Pentingnya terhadap Jabatan		
			Mutlak	Penting	Perlu
A. Pendidikan	1. Jenjang	Memiliki kualifikasi pendidikan paling rendah Sarjana atau Diploma IV			
	2. Bidang Ilmu	Ilmu Sosial/Manajemen/Ekonomi atau bidang yang relevan dengan tugas jabatan			
B. Pelatihan	1. Manajerial	- Pelatihan Kepemimpinan Pengawas - Pelatihan Kepemimpinan Pelaksana	√		
	2. Teknis	- Diklat Teknis Administrasi Keuangan Daerah		√	

# Pemerintah Kabupaten Luwu Timur Tahun 2023

		<ul style="list-style-type: none"> <li>- Diklat Teknis Perencanaan dan penganggaran Keuangan</li> <li>- Diklat Teknis Penataisahaan dan Akuntansi Keuangan Daerah</li> <li>- Diklat Teknis Pelaporan dan Pertanggung Jawaban Keuangan Daerah</li> </ul>		√	
	3. Fungsional				
<b>C. Pengalaman Kerja</b>		<ul style="list-style-type: none"> <li>- Memiliki pengalaman dalam Jabatan pelaksana paling singkat 4 (empat) tahun atau JF yang setingkat dengan Jabatan pelaksana sesuai dengan bidang tugas Jabatan yang akan diduduki.</li> <li>- Memiliki integritas dan moralitas yang baik.</li> </ul>	√		
<b>D. Pangkat</b>	Penata Muda Tk. I / III.b				
<b>E. Indikator Kinerja Jabatan</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Optimalisasi penyiapan bahan penyusunan kebijakan teknis</li> <li>2. Peningkatan kualitas pembinaan dan koordinasi</li> <li>3. Ketepatan pelaksanaan program dan kegiatan Keuangan.</li> </ol>				

# Pemerintah Kabupaten Luwu Timur Tahun 2023

## STANDAR KOMPETENSI JABATAN ASN

Nama Jabatan	:	Kepala Sub Bagian Perencanaan
Kelompok Jabatan	:	Administrasi
Urusan Pemerintah	:	Ketentraman dan Ketertiban Umum Serta Perlindungan Masyarakat
Kode Jabatan	:	

I. IKHTISAR JABATAN			
Ikhtisar Jabatan	memimpin dan melaksanakan penyiapan bahan, menghimpun, mengelola dan melaksanakan pengumpulan bahan dan mengelola penyusunan perencanaan, penyajian data dan penyusunan laporan kinerja sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.		
II. STANDAR KOMPETENSI			
Kompetensi	Level	Deskripsi	Indikator Kompetensi
<b>A. Manajerial</b>			
1. Integritas	2	Mampu memastikan, menanamkan keyakinan bersama agar anggota yang dipimpin bertindak sesuai nilai, norma, dan etika organisasi, dalam lingkup formal	2.1 Memastikan anggota yang dipimpin bertindak sesuai dengan nilai, norma, dan etika organisasi dalam segala situasi dan kondisi 2.2 Mampu untuk memberi apresiasi dan teguran bagi anggota yang dipimpin agar bertindak selaras dengan nilai, norma, dan etika organisasi dalam segala situasi dan kondisi 2.3 Melakukan monitoring dan evaluasi terhadap penerapan sikap integritas di dalam unit kerja yang dipimpin
2. Kerjasama	2	Menumbuhkan tim kerja yang partisipatif dan efektif	2.1. Membantu orang lain dalam menyelesaikan tugas-tugas mereka untuk mendukung sasaran tim 2.2. Berbagi informasi yang relevan atau bermanfaat pada anggota tim; mempertimbangkan masukan dan keahlian anggota dalam tim/kelompok kerja serta bersedia untuk belajar dari orang lain 2.3. Membangun komitmen yang tinggi untuk menyelesaikan tugas tim
3. Komunikasi	2	Aktif menjalankan komunikasi secara formal dan informal;	2.1 Menggunakan gaya komunikasi informal untuk

# Pemerintah Kabupaten Luwu Timur Tahun 2023

		Bersedia mendengarkan orang lain, menginterpretasikan pesan dengan respon yang sesuai, mampu menyusun materi presentasi, pidato, naskah, laporan, dll	<p>meningkatkan hubungan profesional</p> <p>2.2. Mendengarkan pihak lain secara aktif; menangkap dan menginterpretasikan pesan-pesan dari orang lain, serta memberikan respon yang sesuai</p> <p>2.3. Membuat materi presentasi, pidato, draft naskah, laporan dll sesuai arahan pimpinan</p>
4. Orientasi pada Hasil	2	Berupaya meningkatkan hasil kerja pribadi yang lebih tinggi dari standar yang ditetapkan, mencari, mencoba metode alternatif untuk peningkatan kinerja	<p>2.1. Menetapkan dan berupaya mencapai standar kerja pribadi yang lebih tinggi dari standar kerja yang ditetapkan organisasi</p> <p>2.2. Mencari, mencoba metode kerja alternatif untuk meningkatkan hasil kerjanya</p> <p>2.3. memberi contoh kepada orang-orang unit kerjanya untuk mencoba menerapkan metode kerja yang lebih efektif yang sudah dilakukannya</p>
5. Pelayanan Publik	2	Mampu mensupervisi/mengawasi/menyelia dan menjelaskan proses pelaksanaan tugas tugas pemerintahan/pelayanan publik secara transparan	<p>2.1. Menunjukkan sikap yakin dalam mengerjakan tugas-tugas pemerintahan/pelayanan publik, mampu menyelia dan menjelaskan secara obyektif bila ada yang mempertanyakan kebijakan yang diambil</p> <p>2.2. Secara aktif mencari informasi untuk mengenali kebutuhan pemangku kepentingan agar dapat menjalankan pelaksanaan tugas pemerintahan, pembangunan dan pelayanan publik secara cepat dan tanggap</p> <p>2.3. Mampu mengenali dan memanfaatkan kebiasaan, tatacara, situasi tertentu sehingga apa yang disampaikan menjadi perhatian pemangku kepentingan dalam hal penyelesaian tugas-tugas pemerintahan, pembangunan dan pelayanan publik</p>

# Pemerintah Kabupaten Luwu Timur Tahun 2023

6. Pengembangan Diri dan Orang Lain	2	Meningkatkan kemampuan bawahan dengan memberikan contoh dan penjelasan cara melaksanakan suatu pekerjaan	<ul style="list-style-type: none"> <li>2.1. Meningkatkan kemampuan bawahan dengan memberikan contoh, instruksi, penjelasan dan petunjuk praktis yang jelas kepada bawahan dalam menyelesaikan suatu pekerjaan</li> <li>2.2. Membantu bawahan untuk mempelajari proses, program atau sistem baru</li> <li>2.3. Menggunakan metode lain untuk meyakinkan bahwa orang lain telah memahami penjelasan atau pengarahan</li> </ul>
7. Mengelola Perubahan	2	Proaktif beradaptasi mengikuti perubahan	<ul style="list-style-type: none"> <li>2.1. Menyesuaikan cara kerja lama dengan menerapkan metode/proses baru selaras dengan ketentuan yang berlaku tanpa arahan orang lain</li> <li>2.2. Mengembangkan kemampuan diri untuk menghadapi perubahan</li> <li>2.3. Cepat dan tanggap dalam menerima perubahan</li> </ul>
8. Pengambilan Keputusan	2	Menganalisis masalah secara mendalam	<ul style="list-style-type: none"> <li>2.1. Melakukan analisis secara mendalam terhadap informasi yang tersedia dalam upaya mencari solusi</li> <li>2.2. Mempertimbangkan berbagai alternatif yang ada sebelum membuat</li> <li>2.3. Membuat keputusan operasional berdasarkan kesimpulan dari berbagai sumber informasi sesuai dengan pedoman yang ada</li> </ul>
<b>B. Sosial Kultural</b>			
9. Perekat Bangsa	2	Aktif mengembangkan sikap saling menghargai, menekankan persamaan dan persatuan	<ul style="list-style-type: none"> <li>2.1 menampilkan sikap dan perilaku yang peduli akan nilai-nilai keberagaman dan menghargai perbedaan</li> <li>2.2 Membangun hubungan baik antar individu dalam organisasi, mitra kerja, pemangku kepentingan</li> <li>2.3 Bersikap tenang, mampu mengendalikan emosi, kemarahan dan frustrasi dalam</li> </ul>

# Pemerintah Kabupaten Luwu Timur Tahun 2023

			menghadapi pertentangan yang ditimbulkan oleh perbedaan latar belakang, agama/kepercayaan, suku, jender, sosial ekonomi, preferensi politik di lingkungan unit kerjanya
<b>C. Teknis</b>			
10. Advokasi Kebijakan Otonomi Daerah	2	Mampu melaksanakan pengelolaan <b>Advokasi Kebijakan Otonomi Daerah</b> sesuai pedoman kerja/petunjuk teknis	<p>2.1 Mampu Menyusun rencana pengelolaan <b>Advokasi Kebijakan Otonomi Daerah</b></p> <p>2.2 Mampu melaksanakan pengelolaan <b>Advokasi Kebijakan Otonomi Daerah.</b></p> <p>2.3 Mampu menjelaskan secara lengkap, rinci dan jelas perihal pengelolaan <b>Advokasi Kebijakan Otonomi Daerah</b> serta Potensinya kepada masyarakat dan stakeholder.</p>
11. Advokasi Kebijakan Ketentraman dan Ketertiban umum serta Perlindungan Masyarakat	2	Mampu melaksanakan pengelolaan <b>Advokasi Kebijakan Ketentraman dan Ketertiban umum serta Perlindungan Masyarakat</b> sesuai pedoman kerja/petunjuk teknis	<p>2.1 Mampu Menyusun rencana pengelolaan <b>Advokasi Kebijakan Ketentraman dan Ketertiban umum serta Perlindungan Masyarakat</b></p> <p>2.2 Mampu melaksanakan pengelolaan <b>Advokasi Kebijakan Ketentraman dan Ketertiban umum serta Perlindungan Masyarakat.</b></p> <p>2.3 Mampu menjelaskan secara lengkap, rinci dan jelas perihal pengelolaan <b>Advokasi Kebijakan Ketentraman dan Ketertiban umum serta Perlindungan Masyarakat</b> serta Potensinya kepada masyarakat dan stakeholder.</p>
12. Perumusan dan Penyusunan Rencana Strategis	2	Mampu melaksanakan pengelolaan <b>Perumusan dan Penyusunan Rencana Strategis</b> sesuai pedoman kerja/petunjuk teknis	<p>2.1 Mampu Menyusun rencana pengelolaan <b>Perumusan dan Penyusunan Rencana Strategis.</b></p> <p>2.2 Mampu melaksanakan pengelolaan <b>Perumusan dan Penyusunan Rencana Strategis.</b></p> <p>2.3 Mampu menjelaskan secara lengkap, rinci dan jelas perihal pengelolaan <b>Perumusan dan</b></p>

# Pemerintah Kabupaten Luwu Timur Tahun 2023

			<b>Penyusunan Rencana Strategis</b> serta Potensinya kepada masyarakat dan stakeholder.		
13. Perumusan dan Penyusunan Renja	2	Mampu melaksanakan pengelolaan <b>Perumusan dan Penyusunan Renja</b> sesuai pedoman kerja/petunjuk teknis	2.1 Mampu Menyusun rencana pengelolaan <b>Perumusan dan Penyusunan Renja</b> . 2.2 Mampu melaksanakan pengelolaan <b>Perumusan dan Penyusunan Renja</b> . 2.3 Mampu menjelaskan secara lengkap, rinci dan jelas perihal pengelolaan <b>Perumusan dan Penyusunan Renja</b> serta Potensinya kepada masyarakat dan stakeholder.		
14. Perumusan dan Penyusunan RKA	2	Mampu melaksanakan pengelolaan <b>Perumusan dan Penyusunan RKA</b> sesuai pedoman kerja/petunjuk teknis	2.1 Mampu Menyusun rencana pengelolaan <b>Perumusan dan Penyusunan RKA</b> . 2.2 Mampu melaksanakan pengelolaan <b>Perumusan dan Penyusunan RKA</b> . 2.3 Mampu menjelaskan secara lengkap, rinci dan jelas perihal pengelolaan <b>Perumusan dan Penyusunan RKA</b> serta Potensinya kepada masyarakat dan stakeholder.		
15. Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah	2	Mampu melaksanakan pengelolaan <b>Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah</b> sesuai pedoman kerja/petunjuk teknis	2.1 Mampu Menyusun rencana pengelolaan <b>Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah</b> . 2.2 Mampu melaksanakan pengelolaan <b>Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah</b> . 2.3 Mampu menjelaskan secara lengkap, rinci dan jelas perihal pengelolaan <b>Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah</b> serta Potensinya kepada masyarakat dan stakeholder.		
<b>III. Persyaratan Jabatan</b>					
<b>Jenis Persyaratan</b>		<b>Uraian</b>	<b>Tingkat Pentingnya terhadap Jabatan</b>		
			<b>Mutlak</b>	<b>Penting</b>	<b>Perlu</b>
<b>A. Pendidikan</b>	1. Jenjang	Memiliki kualifikasi pendidikan paling rendah Sarjana atau Diploma IV			

# Pemerintah Kabupaten Luwu Timur Tahun 2023

	2. Bidang Ilmu	Ilmu Sosial/Manajemen/Ekonomi atau bidang yang relevan dengan tugas jabatan			
<b>B. Pelatihan</b>	1. Manajerial	- Pelatihan Kepemimpinan Pengawas - Pelatihan Kepemimpinan Pelaksana	√ √		
	2. Teknis	- Diklat Penyusunan Renstra - Diklat Penyusunan LAKIP - Diklat Penyusunan Laporan - Diklat Manajemen Perencanaan		√ √ √ √	
	3. Fungsional				
<b>C. Pengalaman Kerja</b>		- Memiliki pengalaman dalam Jabatan pelaksana paling singkat 4 (empat) tahun atau JF yang setingkat dengan Jabatan pelaksana sesuai dengan bidang tugas Jabatan yang akan diduduki. - Memiliki integritas dan moralitas yang baik.	√ √		
<b>D. Pangkat</b>		Penata Muda Tk. I / III.b			
<b>E. Indikator Kinerja Jabatan</b>		1. Optimalisasi penyiapan bahan penyusunan kebijakan teknis 2. Peningkatan kualitas pembinaan dan koordinasi 3. Ketepatan pelaksanaan program dan kegiatan Perencanaan.			

## STANDAR KOMPETENSI JABATAN ASN

Nama Jabatan : Analis Kebencanaan Ahli Madya  
 Kelompok Jabatan : Fungsional  
 Urusan Pemerintah : Ketentraman dan Ketetapan Umum Serta Perlindungan Masyarakat  
 Kode Jabatan : -

I. IKHTISAR JABATAN			
Ikhtisar Jabatan	Melaksanakan Analisis Kebencanaan yang meliputi penyiapan bahan substansi teknis pengaturan bidang kebencanaan, perencanaan analisis bidang kebencanaan, pelaksanaan analisis bidang kebencanaan, pemantauan dan evaluasi, dan penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria		
II. STANDAR KOMPETENSI			
Kompetensi	Level	Deskripsi	Indikator Kompetensi
A. Manajerial			
1. Integritas	4	Mampu menciptakan situasi kerja yang mendorong kepatuhan pada nilai, norma, dan etika organisasi	4.1. Menciptakan situasi kerja yang mendorong seluruh pemangku kepentingan mematuhi nilai, norma, dan etika organisasi dalam segala situasi dan kondisi. 4.2. Mendukung dan menerapkan prinsip moral dan standar etika yang tinggi, serta berani menanggung konsekuensinya. 4.3. Berani melakukan koreksi atau mengambil tindakan atas penyimpangan kode etik/nilai-nilai yang dilakukan oleh orang lain, pada tataran lingkup kerja setingkat instansi meskipun ada resiko.
2. Kerjasama	4	Membangun komitmen tim, sinergi	4.1. Membangun sinergi antar unit kerja di lingkup instansi yang dipimpin; 4.2. Memfasilitasi kepentingan yang berbeda dari unit kerja lain sehingga tercipta sinergi dalam rangka pencapaian target kerja organisasi. 4.3. Mengembangkan sistem yang menghargai kerja sama antar unit, memberikan dukungan / semangat untuk memastikan tercapainya sinergi dalam rangka pencapaian target kerja organisasi.
3. Komunikasi	4	Mampu mengemukakan pemikiran multidimensi	4.1 Mengintegrasikan informasi-informasi penting

		secara lisan dan tertulis untuk mendorong kesepakatan dengan tujuan meningkatkan kinerja secara keseluruhan	hasil diskusi dengan pihak lain untuk mendapatkan pemahaman yang sama; Berbagi informasi dengan pemangku kepentingan untuk tujuan meningkatkan kinerja secara keseluruhan; 4.2. Menuangkan pemikiran/konsep yang multidimensi dalam bentuk tulisan formal; 4.3. Menyampaikan informasi secara persuasif untuk mendorong pemangku kepentingan sepakat pada langkah-langkah bersama dengan tujuan meningkatkan kinerja secara keseluruhan
4. Orientasi pada Hasil	4	Mendorong unit kerja mencapai target yang ditetapkan atau melebihi hasil kerja sebelumnya	4.1. Mendorong unit kerja di tingkat instansi untuk mencapai kinerja yang melebihi target yang ditetapkan; 4.2. Memantau dan mengevaluasi hasil kerja unitnya agar selaras dengan sasaran strategis instansi; 4.3. Mendorong pemanfaatan sumber daya bersama antar unit kerja dalam rangka meningkatkan efektifitas dan efisiensi pencapaian target organisasi
5. Pelayanan Publik	4	Mampu memonitor, mengevaluasi, memperhitungkan dan mengantisipasi dampak dari isu-isu jangka panjang, kesempatan, atau kekuatan politik dalam hal pelayanan kebutuhan pemangku kepentingan yang transparan, objektif, dan profesional	4.1. Memahami dan memberi perhatian kepada isu-isu jangka panjang, kesempatan atau kekuatan politik yang mempengaruhi organisasi dalam hubungannya dengan dunia luar, memperhitungkan dan mengantisipasi dampak terhadap pelaksanaan tugas-tugas pelayanan publik secara objektif, transparan, dan profesional dalam lingkup organisasi; 4.2. Menjaga agar kebijakan pelayanan publik yang diselenggarakan oleh instansinya telah selaras dengan standar pelayanan

			<p>yang objektif, netral, tidak memihak, tidak diskriminatif, serta tidak terpengaruh kepentingan pribadi/kelompok/partai politik;</p> <p>4.3. Menerapkan strategi jangka panjang yang berfokus pada pemenuhan kebutuhan pemangku kepentingan dalam menyusun kebijakan dengan mengikuti standar objektif, netral, tidak memihak, tidak diskriminatif, transparan, tidak terpengaruh kepentingan pribadi/kelompok</p>
6. Pengembangan Diri dan Orang Lain	4	Menyusun program pengembangan jangka panjang dalam rangka mendorong manajemen pembelajaran	<p>4.1. Menyusun program pengembangan jangka panjang bersama-sama dengan bawahan, termasuk didalamnya penetapan tujuan, bimbingan, penugasan dan pengalaman lainnya, serta mengalokasikan waktu untuk mengikuti pelatihan / pendidikan / pengembangan kompetensi dan karir;</p> <p>4.2. Melaksanakan manajemen pembelajaran termasuk evaluasi dan umpan balik pada tataran organisasi;</p> <p>4.3. Mengembangkan orang-orang disekitarnya secara konsisten, melakukan kaderisasi untuk posisi-posisi di unit kerjanya</p>
7. Mengelola Perubahan	4	Memimpin perubahan pada unit kerja	<p>4.1. Mengarahkan unit kerja untuk lebih siap dalam menghadapi perubahan termasuk memitigasi risiko yang mungkin terjadi;</p> <p>4.2. Memastikan perubahan sudah diterapkan secara aktif di lingkup unit kerjanya secara berkala;</p> <p>4.3. Memimpin dan memastikan penerapan program-program perubahan selaras antar unit kerja</p>
8. Pengambilan Keputusan	4	Menyelesaikan masalah yang mengandung risiko tinggi, mengantisipasi	<p>4.1. Menyusun dan/atau memutuskan konsep penyelesaian masalah yang</p>

		dampak keputusan, membuat tindakan pengamanan; mitigasi risiko	<p>melibatkan beberapa/seluruh fungsi dalam organisasi.</p> <p>4.2. Menghasilkan solusi dari berbagai masalah yang kompleks, terkait dengan bidang kerjanya yang berdampak pada pihak lain.</p> <p>4.3. Membuat keputusan dan mengantisipasi dampak keputusannya serta menyiapkan tindakan penanganannya (mitigasi risiko)</p>
<b>B. Sosial Kultural</b>			
9. Perekat Bangsa	4	Mendayagunakan perbedaan secara konstruktif dan kreatif untuk meningkatkan efektifitas organisasi	<p>4.1 Menginisiasi dan merepresentasikan pemerintah di lingkungan kerja dan masyarakat untuk senantiasa menjaga persatuan dan kesatuan dalam keberagaman dan menerima segala bentuk perbedaan dalam kehidupan bermasyarakat;</p> <p>4.2 Mampu mendayagunakan perbedaan latar belakang, agama/kepercayaan, suku, jender, sosial ekonomi, preferensi politik untuk mencapai kelancaran pencapaian tujuan organisasi.</p> <p>4.3 Mampu membuat program yang mengakomodasi perbedaan latar belakang, agama/kepercayaan, suku, jender, sosial ekonomi, preferensi politik</p>
<b>C. Teknis</b>			
10. <b>Advokasi Kebijakan Otonomi Daerah</b>	4	Mampu mengembangkan strategi <b>advokasi kebijakan otonomi daerah</b> yang tepat sesuai kondisi.	<p>4.1 Mengevaluasi strategi advokasi yang ada saat ini, menganalisis kekuatan dan kekurangan berbagai metode yang dijalankan dengan kelompok sasaran yang berbeda.</p> <p>4.2 Mengembangkan norma standar, prosedur, kriteria, pedoman, dan/atau petunjuk teknis strategi <b>advokasi kebijakan otonomi daerah</b>.</p> <p>4.3 Meningkatkan kapasitas</p>

			<p>pemangku kepentingan untuk mengembangkan strategi advokasi yang dapat dijalankan oleh mereka sendiri dalam menerapkan kebijakan otonomi daerah.</p>
<p>11. <b>Advokasi Kebijakan Ketentraman dan Ketertiban umum serta Perlindungan Masyarakat</b></p>	4	<p>Mampu mengevaluasi dan menyusun perangkat norma standar prosedur instrument pengelolaan Advokasi Kebijakan Ketentraman dan Ketertiban umum serta Perlindungan Masyarakat</p>	<p>4.1 Mampu melakukan evaluasi terhadap teknis/metode/sistem cara kerja menemu kenali kelebihan dan kekurangan melakukan pengembangan atau perbaikan cara kerja pengelolaan <b>Advokasi Kebijakan Ketentraman dan Ketertiban umum serta Perlindungan Masyarakat</b></p> <p>4.2 Mampu menyusun pedoman, petunjuk teknis, cara kerja yang dijadikan norma standar, prosedur, instrumen pelaksanaan pengelolaan <b>Advokasi Kebijakan Ketentraman dan Ketertiban umum serta Perlindungan Masyarakat</b></p> <p>4.3 Mampu meyakinkan dan memperoleh dukungan dari stakeholder pelaksanaan pengelolaan <b>Advokasi Kebijakan Ketentraman dan Ketertiban umum serta Perlindungan Masyarakat</b> dan memberikan bimbingan dan fasilitasi kepada instansi lain atau stakeholder terkait <b>Advokasi Kebijakan Ketentraman dan Ketertiban umum serta Perlindungan Masyarakat</b></p>
<p>12. <b>Pencegahan dan Kesiapsiagaan Bencana</b></p>	4	<p>Mampu mengevaluasi dan menyusun perangkat norma standar prosedur instrument pengelolaan <b>Pencegahan dan Kesiapsiagaan Bencana</b></p>	<p>4.1 Mampu melakukan evaluasi terhadap teknis/metode/sistem cara kerja menemu kenali kelebihan dan kekurangan melakukan pengembangan atau perbaikan cara kerja <b>Pencegahan dan Kesiapsiagaan Bencana</b></p> <p>4.2 Mampu menyusun pedoman, petunjuk teknis, cara kerja yang dijadikan norma standar,</p>

			<p>prosedur, instrumen pelaksanaan <b>Pencegahan dan Kesiapsiagaan Bencana</b></p> <p>4.3 Mampu meyakinkan dan memperoleh dukungan dari stakeholder pelaksanaan <b>Pencegahan dan Kesiapsiagaan Bencana</b> dan memberikan bimbingan dan fasilitasi kepada instansi lain atau stakeholder terkait <b>Pencegahan dan Kesiapsiagaan Bencana</b></p>
<b>13. Penelaahan bahan kajian di bidang bencana alam</b>	4	Mampu mengevaluasi dan menyusun perangkat norma standar prosedur instrument <b>Penelaahan bahan kajian di bidang bencana alam</b>	<p>4.1 Mampu melakukan evaluasi terhadap teknis/metode/sistem cara kerja menemu kenali kelebihan dan kekurangan melakukan pengembangan atau perbaikan cara kerja <b>Penelaahan bahan kajian di bidang bencana alam</b></p> <p>4.2 Mampu menyusun pedoman, petunjuk teknis, cara kerja yang dijadikan norma standar, prosedur, instrumen pelaksanaan <b>Penelaahan bahan kajian di bidang bencana alam</b></p> <p>4.3 Mampu meyakinkan dan memperoleh dukungan dari stakeholder pelaksanaan Penanganan Darurat dan memberikan bimbingan dan fasilitasi kepada instansi lain atau stakeholder terkait <b>Penelaahan bahan kajian di bidang bencana alam</b></p>
<b>14. Penyuluhan, evaluasi dan pelaporan di bidang bencana</b>	4	Mampu mengevaluasi dan menyusun perangkat norma standar prosedur instrument <b>Penyuluhan, evaluasi dan pelaporan di bidang bencana</b>	<p>4.1 Mampu melakukan evaluasi terhadap teknis/metode/sistem cara kerja menemu kenali kelebihan dan kekurangan melakukan pengembangan atau perbaikan cara kerja <b>Penyuluhan, evaluasi dan pelaporan di bidang bencana</b></p> <p>4.2 Mampu menyusun pedoman, petunjuk teknis, cara kerja yang dijadikan norma standar, prosedur, instrumen pelaksanaan <b>Penyuluhan,</b></p>

			<p><b>evaluasi dan pelaporan di bidang bencana</b></p> <p>4.3 Mampu meyakinkan dan memperoleh dukungan dari stakeholder <b>Penyuluhan, evaluasi dan pelaporan di bidang bencana</b> dan memberikan bimbingan dan fasilitasi kepada instansi lain atau stakeholder terkait Pemberdayaan <b>Penyuluhan, evaluasi dan pelaporan di bidang bencana</b></p>
15. Analisis kebutuhan penanganan darurat bencana	4	Mampu mengevaluasi dan menyusun perangkat norma standar prosedur instrument pengelolaan <b>Analisis kebutuhan penanganan darurat bencana</b>	<p>4.1 Mampu melakukan evaluasi terhadap teknis/metode/sistem cara kerja menemu kenali kelebihan dan kekurangan melakukan pengembangan atau perbaikan cara kerja pengelolaan <b>Analisis kebutuhan penanganan darurat bencana</b></p> <p>4.2 Mampu menyusun pedoman, petunjuk teknis, cara kerja yang dijadikan norma standar, prosedur, instrumen pelaksanaan pengelolaan <b>Analisis kebutuhan penanganan darurat bencana</b></p> <p>4.3 Mampu meyakinkan dan memperoleh dukungan dari stakeholder pelaksanaan pengelolaan <b>Analisis kebutuhan penanganan darurat bencana</b> dan memberikan bimbingan dan fasilitasi kepada instansi lain atau stakeholder terkait Pengawasan Pengelolaan <b>Analisis kebutuhan penanganan darurat bencana</b></p>

III. Persyaratan Jabatan				
Jenis Persyaratan	Uraian	Tingkat Pentingnya terhadap Jabatan		
		Mutlak	Penting	Perlu
A. Pendidikan	1. Jenjang	Memiliki kualifikasi pendidikan paling rendah sarjana atau diploma IV		

	2. Bidang Ilmu	Sarjana/Manajemen, Administrasi dan bidang yang relevan dengan tugas jabatan			
B. Pelatihan	1. Manajerial	Pelatihan Dasar CPNS	√		
	2. Teknis	1. Diklat Manajemen Resiko 2. Diklat Teknis Tata Naskah Dinas		√ √	
	3. Fungsional	- Diklat Analisa Kawasan Rawan dan Bencana - Diklat Kesiagaan dan Sistem Tanggap Darurat		√ √	
C. Pengalaman Kerja		1. Memiliki pengalaman Jabatan dalam bidang tugas yang terkait dengan Jabatan yang akan diduduki secara kumulatif paling kurang selama 5 (lima) tahun. 2. Sedang atau pernah menduduki Jabatan administrator atau JF jenjang ahli madya paling singkat 2 (dua) tahun. 3. Memiliki rekam jejak Jabatan, integritas, dan moralitas yang baik	√  √  √		
D. Pangkat	Pembina / IV.a				
E. Indikator Kinerja Jabatan	1. Optimalisasi kebijakan sistem dan strategi penanggulangan bencana 2. Persentase evaluasi hasil pelaksanaan penanganan darurat bencana 3. Persentase evaluasi hasil analisis potensi kebencanaan, ancaman, kerentanan, risiko, dan kapasitas 4. Kualitas supervisi bidang kebencanaan tingkat unit kerja, instansi, atau provinsi				

## STANDAR KOMPETENSI JABATAN ASN

<b>Nama Jabatan</b>	:	Analisis Kebencanaan Ahli Muda
<b>Kelompok Jabatan</b>	:	Fungsional
<b>Urusan Pemerintah</b>	:	Ketentraman dan Ketertiban Umum Serta Perlindungan Masyarakat
<b>Kode Jabatan</b>	:	

I. IKHTISAR JABATAN			
<b>Ikhtisar Jabatan</b>	Melaksanakan Analisis Kebencanaan yang meliputi penyiapan bahan substansi teknis pengaturan bidang kebencanaan, perencanaan analisis bidang kebencanaan, pelaksanaan analisis bidang kebencanaan, pemantauan dan evaluasi, dan penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria		
II. STANDAR KOMPETENSI			
Kompetensi	Level	Deskripsi	Indikator Kompetensi
A. Manajerial			
1. <b>Integritas</b>	3	Mampu memastikan, menanamkan keyakinan bersama agar anggota yang dipimpin bertindak sesuai nilai, norma, dan etika organisasi, dalam lingkup formal	3.1 Memastikan anggota yang dipimpin bertindak sesuai dengan nilai, norma, dan etika organisasi dalam segala situasi dan kondisi 3.2 Mampu untuk memberi apresiasi dan teguran bagi anggota yang dipimpin agar bertindak selaras dengan nilai, norma, dan etika organisasi dalam segala situasi dan kondisi 3.3 Melakukan monitoring dan evaluasi terhadap penerapan sikap integritas di dalam unit kerja yang dipimpin
2. <b>Kerjasama</b>	3	Efektif membangun tim kerja untuk peningkatan kinerja organisasi	3.1. Melihat kekuatan/kelemahan anggota tim, membentuk tim yang tepat, mengantisipasi kemungkinan hambatan, dan mencari solusi yang optimal 3.2. Mengupayakan dan mengutamakan pengambilan keputusan berdasarkan usulan-usulan anggota tim/kelompok, bernegosiasi secara efektif untuk upaya penyelesaian pekerjaan yang menjadi target kinerja kelompok dan/atau unit kerja 3.3. Membangun aliansi dengan para pemangku kepentingan dalam rangka mendukung penyelesaian target kerja kelompok
3. <b>Komunikasi</b>	3	Berkomunikasi secara asertif, terampil berkomunikasi lisan/tertulis untuk	3.1 Menyampaikan suatu informasi yang sensitif/rumit dengan cara penyampaian dan kondisi yang tepat, sehingga dapat dipahami dan

		menyampaikan informasi yang sensitif/ rumit/ kompleks	<p>diterima oleh pihak lain</p> <p>3.2. Menyederhanakan topik yang rumit dan sensitif sehingga lebih mudah dipahami dan diterima orang lain</p> <p>3.3. Membuat laporan tahunan/periodik/naskah/dokumen/proposal yang kompleks; Membuat surat resmi yang sistematis dan tidak menimbulkan pemahaman yang berbeda; membuat proposal yang rinci dan lengkap</p>
<b>4. Orientasi pada Hasil</b>	3	Menetapkan target kerja yang menantang bagi unit kerja, memberi apresiasi dan teguran untuk mendorong kinerja	<p>3.1. Menetapkan target kinerja unit yang lebih tinggi dari target yang ditetapkan organisasi</p> <p>3.2. Memberikan apresiasi dan teguran untuk mendorong pencapaian hasil unit kerjanya</p> <p>3.3. Mengembangkan metode kerja yang lebih efektif dan efisien untuk mencapai target kerja unitnya</p>
<b>5. Pelayanan Publik</b>	3	Mampu memanfaatkan kekuatan kelompok serta memperbaiki standar pelayanan publik di lingkup unit kerja	<p>3.1. Memahami, mendeskripsikan pengaruh dan hubungan/kekuatan kelompok yang sedang berjalan di organisasi (aliansi atau persaingan), dan dampaknya terhadap unit kerja untuk menjalankan tugas pemerintahan secara profesional dan netral, tidak memihak</p> <p>3.2. Menggunakan keterampilan dan pemahaman lintas organisasi untuk secara efektif memfasilitasi kebutuhan kelompok yang lebih besar dengan cara-cara yang mengikuti standar objektif, transparan, profesional, sehingga tidak merugikan para pihak di lingkup pelayanan publik unit kerjanya</p> <p>3.3. Mengimplementasikan cara-cara yang efektif untuk memantau dan mengevaluasi masalah yang dihadapi pemangku kepentingan/masyarakat serta mengantisipasi kebutuhan mereka saat menjalankan tugas pelayanan publik di unit kerjanya</p>
<b>6. Pengembangan Diri dan Orang Lain</b>	3	Memberikan umpan balik, membimbing	<p>3.1. Memberikan tugas-tugas yang menantang pada bawahan sebagai media belajar untuk mengembangkan kemampuannya</p>

			<p>3.2. Mengamati bawahan dalam mengerjakan tugasnya dan memberikan umpan balik yang objektif dan jujur; melakukan diskusi dengan bawahan untuk memberikan bimbingan dan umpan balik yang berguna bagi bawahan</p> <p>3.3. Mendorong kepercayaan diri bawahan; memberikan kepercayaan penuh pada bawahan untuk mengerjakan tugas dengan caranya sendiri; memberi kesempatan dan membantu bawahan menemukan peluang untuk berkembang</p>
<b>7. Mengelola Perubahan</b>	3	Membantu orang lain mengikuti perubahan, mengantisipasi perubahan secara tepat	<p>3.1. Membantu orang lain dalam melakukan perubahan</p> <p>3.2. Menyesuaikan prioritas kerja secara berulang-ulang jika diperlukan</p> <p>3.3. Mengantisipasi perubahan yang dibutuhkan oleh unit kerjanya secara tepat. Memberikan solusi efektif terhadap masalah yang ditimbulkan oleh adanya perubahan</p>
<b>8. Pengambilan Keputusan</b>	3	Membandingkan berbagai alternatif, menyeimbangkan risiko keberhasilan dalam implementasi	<p>3.1. Membandingkan berbagai alternatif tindakan dan implikasinya</p> <p>3.2. Memilih alternatif solusi yang terbaik, membuat keputusan operasional mengacu pada alternatif solusi terbaik yang didasarkan pada analisis data yang sistematis, seksama, mengikuti prinsip kehati-hatian</p> <p>3.3. Menyeimbangkan antara kemungkinan risiko dan keberhasilan dalam implementasinya</p>
<b>B. Sosial Kultural</b>			
<b>9. Perekat Bangsa</b>	3	Mempromosikan, mengembangkan sikap toleransi dan persatuan	<p>3.1. Mempromosikan sikap menghargai perbedaan di antara orang-orang yang mendorong toleransi dan keterbukaan</p> <p>3.2. Melakukan pemetaan sosial di masyarakat sehingga dapat memberikan respon yang sesuai dengan budaya yang berlaku. Mengidentifikasi potensi kesalahpahaman yang diakibatkan adanya keragaman budaya yang ada</p> <p>3.3. Menjadi mediator untuk menyelesaikan konflik atau</p>

			mengurangi dampak negatif dari konflik atau potensi konflik
<b>C. Teknis</b>			
10. <b>Advokasi Kebijakan Otonomi Daerah</b>	3	Mampu menyelenggarakan <b>advokasi kebijakan otonomi daerah</b>	<p>3.1 Mampu menyusun instrumen, materi, dan kelengkapan pelaksanaan <b>advokasi kebijakan otonomi daerah</b>.</p> <p>3.2 Mampu mengembangkan serta menjalankan strategi atau intervensi advokasi dalam mengatasi hambatan sistemik dan resistensi pemangku kepentingan dalam menerapkan kebijakan otonomi daerah</p> <p>3.3 Mampu mengimplementasikan strategi advokasi dengan target dan waktu yang terukur dan terencana dengan mendapatkan hasil sesuai yang diharapkan</p>
11. <b>Advokasi Kebijakan Ketentraman dan Ketertiban umum serta Perlindungan Masyarakat</b>	3	Mampu mengidentifikasi Prinsip-prinsip teori dan praktek tanpa bantuan atau pengawasan langsung tentang pengembangan <b>Advokasi Kebijakan Ketentraman dan Ketertiban umum serta Perlindungan Masyarakat</b> Strategis yang dimiliki oleh organisasi dengan menggunakan metode yang sistematis.	<p>3.1 Menguasai pengetahuan dan keterampilan tentang <b>Advokasi Kebijakan Ketentraman dan Ketertiban umum serta Perlindungan Masyarakat</b> dalam rangka tercapainya tujuan visi dan misi organisasi dengan mengikuti pelatihan tingkat menengah</p> <p>3.2 Mampu melakukan tugas <b>Advokasi Kebijakan Ketentraman dan Ketertiban umum serta Perlindungan Masyarakat</b> secara spesifik dan menganalisis informasi untuk menyelesaikan permasalahan yang timbul dalam tugas</p> <p>3.3 Mampu menganalisa proses pelaksanaan <b>Advokasi Kebijakan Ketentraman dan Ketertiban umum serta Perlindungan Masyarakat</b> tanpa bantuan atau pengawasan langsung dengan kecepatan dan penyelesaian yang lebih tepat</p>
12. <b>Pencegahan dan Kesiapsiagaan Bencana</b>	3	Mampu mengidentifikasi Prinsip-prinsip teori dan praktek tanpa bantuan atau pengawasan	<p>3.1 Menguasai pengetahuan dan keterampilan tentang <b>Pencegahan dan Kesiapsiagaan Bencana</b> dalam rangka tercapainya tujuan visi dan misi organisasi dengan mengikuti pelatihan tingkat</p>

		<p>langsung tentang <b>Pencegahan dan Kesiapsiagaan Bencana</b> yang dimiliki oleh organisasi dengan menggunakan metode yang sistematis.</p>	<p>3.2 menengah Mampu melakukan tugas <b>Pencegahan dan Kesiapsiagaan Bencana</b> secara spesifik dan menganalisis informasi untuk menyelesaikan permasalahan yang timbul dalam tugas</p> <p>3.3 Mampu menganalisa proses pelaksanaan <b>Pencegahan dan Kesiapsiagaan Bencana</b> tanpa bantuan atau pengawasan langsung dengan kecepatan dan penyelesaian yang lebih tepat</p>
13. <b>Penelaahan bahan kajian di bidang bencana alam</b>	3	<p>Mampu mengidentifikasi Prinsip-prinsip teori dan praktek tanpa bantuan atau pengawasan langsung tentang <b>Penelaahan bahan kajian di bidang bencana alam</b> yang dimiliki oleh organisasi dengan menggunakan metode yang sistematis.</p>	<p>3.1 Menguasai pengetahuan dan keterampilan tentang <b>Penelaahan bahan kajian di bidang bencana alam</b> dalam rangka tercapainya tujuan visi dan misi organisasi dengan mengikuti pelatihan tingkat menengah</p> <p>3.2 Mampu melakukan tugas <b>Penelaahan bahan kajian di bidang bencana alam</b> secara spesifik dan menganalisis informasi untuk menyelesaikan permasalahan yang timbul dalam tugas</p> <p>3.3 Mampu menganalisa proses pelaksanaan <b>Penelaahan bahan kajian di bidang bencana alam</b> tanpa bantuan atau pengawasan langsung dengan kecepatan dan penyelesaian yang lebih tepat</p>
14. <b>Penyuluhan, evaluasi dan pelaporan di bidang bencana</b>	3	<p>Mampu mengidentifikasi Prinsip-prinsip teori dan praktek tanpa bantuan atau pengawasan langsung tentang <b>Penyuluhan, evaluasi dan pelaporan di bidang bencana</b> di organisasi yang dimiliki oleh organisasi dengan menggunakan metode yang</p>	<p>3.1 Menguasai pengetahuan dan keterampilan tentang <b>Penyuluhan, evaluasi dan pelaporan di bidang bencana</b> di organisasi dalam rangka tercapainya tujuan visi dan misi organisasi dengan mengikuti pelatihan tingkat menengah</p> <p>3.2 Mampu melakukan tugas <b>Penyuluhan, evaluasi dan pelaporan di bidang bencana</b> di organisasi secara spesifik dan menganalisis informasi untuk menyelesaikan permasalahan yang timbul dalam tugas</p> <p>3.3 Mampu menganalisa proses pelaksanaan <b>Penyuluhan, evaluasi dan pelaporan di bidang</b></p>

		sistematis.	<b>bencana</b> di organisasi tanpa bantuan atau pengawasan langsung dengan kecepatan dan penyelesaian yang lebih tepat
15. Analisis kebutuhan penanganan darurat bencana	3	Mampu mengidentifikasi Prinsip-prinsip teori dan praktek tanpa bantuan atau pengawasan langsung tentang <b>Analisis kebutuhan penanganan darurat bencana</b> yang dimiliki oleh organisasi dengan menggunakan metode yang sistematis.	<p>3.1 Menguasai pengetahuan dan keterampilan tentang <b>Analisis kebutuhan penanganan darurat bencana</b> dalam rangka tercapainya tujuan visi dan misi organisasi dengan mengikuti pelatihan tingkat menengah</p> <p>3.2 Mampu melakukan tugas <b>Analisis kebutuhan penanganan darurat bencana</b> secara spesifik dan menganalisis informasi untuk menyelesaikan permasalahan yang timbul dalam tugas</p> <p>3.3 Mampu menganalisa proses pelaksanaan <b>Analisis kebutuhan penanganan darurat bencana</b> tanpa bantuan atau pengawasan langsung dengan kecepatan dan penyelesaian yang lebih tepat</p>

III. Persyaratan Jabatan					
Jenis Persyaratan		Uraian	Tingkat Pentingnya terhadap Jabatan		
			Mutlak	Penting	Perlu
A. Pendidikan	1. Jenjang	Memiliki kualifikasi pendidikan paling rendah Sarjana atau Diploma IV			
	2. Bidang Ilmu	Sarjana/Manajemen, Administrasi dan bidang yang relevan dengan tugas jabatan			
B. Pelatihan	1. Manajerial	- Pelatihan Dasar CPNS	√		
	2. Teknis	- Diklat Manajemen Resiko		√	
		- Diklat Teknis Tata Naskah Dinas		√	
3. Fungsional	- Diklat Analisa Kawasan Rawan dan Bencana		√		
	- Diklat Kesiagaan dan Sistem Tanggap Darurat		√		
C. Pengalaman Kerja	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Memiliki pengalaman dalam Jabatan pelaksana paling singkat 4 (empat) tahun atau JF yang setingkat dengan Jabatan pelaksana sesuai dengan bidang tugas Jabatan yang akan diduduki.</li> <li>- Memiliki integritas dan moralitas yang baik.</li> </ul>		√		
			√		

<b>D. Pangkat</b>	Penata / III.c
<b>E. Indikator Kinerja Jabatan</b>	<ol style="list-style-type: none"><li>1. Kualitas pengkajian kebutuhan perencanaan analisis bidang kebencanaan</li><li>2. Optimalisasi penyusunan pedoman teknis bidang kebencanaan</li><li>3. Optimalisasi pemantauan dan evaluasi bidang kebencanaan</li><li>4. Kualitas potensi kebencanaan, ancaman, kerentanan, resiko dan kapasitas</li></ol>

## STANDAR KOMPETENSI JABATAN ASN

Nama Jabatan	:	Analisis Kebencanaan Ahli Pertama
Kelompok Jabatan	:	Fungsional
Urusan Pemerintah	:	Ketentraman dan Ketertiban Umum Serta Perlindungan Masyarakat
Kode Jabatan	:	

I. IKHTISAR JABATAN			
Ikhtisar Jabatan	Melaksanakan Analisis Kebencanaan yang meliputi penyiapan bahan substansi teknis pengaturan bidang kebencanaan, perencanaan analisis bidang kebencanaan, pelaksanaan analisis bidang kebencanaan, pemantauan dan evaluasi, dan penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria.		
II. STANDAR KOMPETENSI			
Kompetensi	Level	Deskripsi	Indikator Kompetensi
A. Manajerial			
1. Integritas	2	Mampu memastikan, menanamkan keyakinan bersama agar anggota yang dipimpin bertindak sesuai nilai, norma, dan etika organisasi, dalam lingkup formal	2.1 Memastikan anggota yang dipimpin bertindak sesuai dengan nilai, norma, dan etika organisasi dalam segala situasi dan kondisi 2.2 Mampu untuk memberi apresiasi dan teguran bagi anggota yang dipimpin agar bertindak selaras dengan nilai, norma, dan etika organisasi dalam segala situasi dan kondisi 2.3 Melakukan monitoring dan evaluasi terhadap penerapan sikap integritas di dalam unit kerja yang dipimpin
2. Kerjasama	2	Menumbuhkan tim kerja yang partisipatif dan efektif	2.1. Membantu orang lain dalam menyelesaikan tugas-tugas mereka untuk mendukung sasaran tim 2.2. Berbagi informasi yang relevan atau bermanfaat pada anggota tim; mempertimbangkan masukan dan keahlian anggota dalam tim/kelompok kerja serta bersedia untuk belajar dari orang lain 2.3. Membangun komitmen yang tinggi untuk menyelesaikan tugas tim

# Pemerintah Kabupaten Luwu Timur Tahun 2023

<p><b>3. Komunikasi</b></p>	<p>2</p>	<p>Aktif menjalankan komunikasi secara formal dan informal; Bersedia mendengarkan orang lain, menginterpretasikan pesan dengan respon yang sesuai, mampu menyusun materi presentasi, pidato, naskah, laporan, dll</p>	<p>2.1 Menggunakan gaya komunikasi informal untuk meningkatkan hubungan profesional 2.2. Mendengarkan pihak lain secara aktif; menangkap dan menginterpretasikan pesan-pesan dari orang lain, serta memberikan respon yang sesuai 2.3. Membuat materi presentasi, pidato, draft naskah, laporan dll sesuai arahan pimpinan</p>
<p><b>4. Orientasi pada Hasil</b></p>	<p>2</p>	<p>Berupaya meningkatkan hasil kerja pribadi yang lebih tinggi dari standar yang ditetapkan, mencari, mencoba metode alternatif untuk peningkatan kinerja</p>	<p>2.1. Menetapkan dan berupaya mencapai standar kerja pribadi yang lebih tinggi dari standar kerja yang ditetapkan organisasi 2.2. Mencari, mencoba metode kerja alternatif untuk meningkatkan hasil kerjanya 2.3. memberi contoh kepada orang-orang unit kerjanya untuk mencoba menerapkan metode kerja yang lebih efektif yang sudah dilakukannya</p>
<p><b>5. Pelayanan Publik</b></p>	<p>2</p>	<p>Mampu mensupervisi/mengawasi/menyelia dan menjelaskan proses pelaksanaan tugas tugas pemerintahan/pelayanan publik secara transparan</p>	<p>2.1. Menunjukkan sikap yakin dalam mengerjakan tugas-tugas pemerintahan/pelayanan publik, mampu menyelia dan menjelaskan secara obyektif bila ada yang mempertanyakan kebijakan yang diambil 2.2. Secara aktif mencari informasi untuk mengenali kebutuhan pemangku kepentingan agar dapat menjalankan pelaksanaan tugas pemerintahan, pembangunan dan pelayanan publik secara cepat dan tanggap 2.3. Mampu mengenali dan memanfaatkan kebiasaan, tatacara, situasi tertentu sehingga apa yang disampaikan menjadi perhatian pemangku kepentingan dalam hal penyelesaian tugas-tugas</p>

# Pemerintah Kabupaten Luwu Timur Tahun 2023

			pemerintahan, pembangunan dan pelayanan publik
6. Pengembangan Diri dan Orang Lain	2	Meningkatkan kemampuan bawahan dengan memberikan contoh dan penjelasan cara melaksanakan suatu pekerjaan	<p>2.1. Meningkatkan kemampuan bawahan dengan memberikan contoh, instruksi, penjelasan dan petunjuk praktis yang jelas kepada bawahan dalam menyelesaikan suatu pekerjaan</p> <p>2.2. Membantu bawahan untuk mempelajari proses, program atau sistem baru</p> <p>2.3. Menggunakan metode lain untuk meyakinkan bahwa orang lain telah memahami penjelasan atau pengarahan</p>
7. Mengelola Perubahan	2	Proaktif beradaptasi mengikuti perubahan	<p>2.1. Menyesuaikan cara kerja lama dengan menerapkan metode/proses baru selaras dengan ketentuan yang berlaku tanpa arahan orang lain</p> <p>2.2. Mengembangkan kemampuan diri untuk menghadapi perubahan</p> <p>2.3. Cepat dan tanggap dalam menerima perubahan</p>
8. Pengambilan Keputusan	2	Menganalisis masalah secara mendalam	<p>2.1. Melakukan analisis secara mendalam terhadap informasi yang tersedia dalam upaya mencari solusi</p> <p>2.2. Mempertimbangkan berbagai alternatif yang ada sebelum membuat</p> <p>2.3. Membuat keputusan operasional berdasarkan kesimpulan dari berbagai sumber informasi sesuai dengan pedoman yang ada</p>
<b>B. Sosial Kultural</b>			
9. Perekat Bangsa	2	Aktif mengembangkan sikap saling menghargai, menekankan persamaan dan persatuan	<p>2.1 menampilkan sikap dan perilaku yang peduli akan nilai-nilai keberagaman dan menghargai perbedaan</p> <p>2.2 Membangun hubungan baik antar individu dalam organisasi, mitra kerja, pemangku kepentingan</p>

# Pemerintah Kabupaten Luwu Timur Tahun 2023

			2.3 Bersikap tenang, mampu mengendalikan emosi, kemarahan dan frustrasi dalam menghadapi pertentangan yang ditimbulkan oleh perbedaan latar belakang, agama/kepercayaan, suku, jender, sosial ekonomi, preferensi politik di lingkungan unit kerjanya
<b>C. Teknis</b>			
10. Advokasi Kebijakan Otonomi Daerah	2	Mampu melaksanakan pengelolaan <b>Advokasi Kebijakan Otonomi Daerah</b> sesuai pedoman kerja/petunjuk teknis	<p>2.1 Mampu Menyusun rencana pengelolaan <b>Advokasi Kebijakan Otonomi Daerah</b></p> <p>2.2 Mampu melaksanakan pengelolaan <b>Advokasi Kebijakan Otonomi Daerah</b>.</p> <p>2.3 Mampu menjelaskan secara lengkap, rinci dan jelas perihal pengelolaan <b>Advokasi Kebijakan Otonomi Daerah</b> serta Potensinya kepada masyarakat dan stakeholder.</p>
11. Advokasi Kebijakan Ketentraman dan Ketertiban umum serta Perlindungan Masyarakat	2	Mampu melaksanakan pengelolaan <b>Advokasi Kebijakan Ketentraman dan Ketertiban umum serta Perlindungan Masyarakat</b> sesuai pedoman kerja/petunjuk teknis	<p>2.1 Mampu Menyusun rencana pengelolaan <b>Advokasi Kebijakan Ketentraman dan Ketertiban umum serta Perlindungan Masyarakat</b></p> <p>2.2 Mampu melaksanakan pengelolaan <b>Advokasi Kebijakan Ketentraman dan Ketertiban umum serta Perlindungan Masyarakat</b>.</p> <p>2.3 Mampu menjelaskan secara lengkap, rinci dan jelas perihal pengelolaan <b>Advokasi Kebijakan Ketentraman dan Ketertiban umum serta Perlindungan Masyarakat</b> serta Potensinya kepada masyarakat dan stakeholder.</p>
12. Pencegahan dan Kesiapsiagaan Bencana	2	Mampu melaksanakan pengelolaan <b>Pencegahan dan Kesiapsiagaan Bencana</b> sesuai pedoman kerja/petunjuk teknis	<p>2.1 Mampu Menyusun rencana pengelolaan <b>Pencegahan dan Kesiapsiagaan Bencana</b>.</p> <p>2.2 Mampu melaksanakan pengelolaan <b>Pencegahan dan Kesiapsiagaan Bencana</b>.</p> <p>2.3 Mampu menjelaskan secara lengkap, rinci dan jelas perihal</p>

# Pemerintah Kabupaten Luwu Timur Tahun 2023

			pengelolaan <b>Pencegahan dan Kesiapsiagaan Bencana</b> serta Potensinya kepada masyarakat dan stakeholder.
13. <b>Penelaahan bahan kajian di bidang bencana alam</b>	2	Mampu melaksanakan pengelolaan <b>Penelaahan bahan kajian di bidang bencana alam</b> sesuai pedoman kerja/petunjuk teknis	<p>2.1 Mampu Menyusun rencana pengelolaan <b>Penelaahan bahan kajian di bidang bencana alam.</b></p> <p>2.2 Mampu melaksanakan pengelolaan <b>Penelaahan bahan kajian di bidang bencana alam.</b></p> <p>2.3 Mampu menjelaskan secara lengkap, rinci dan jelas perihal pengelolaan <b>Penelaahan bahan kajian di bidang bencana alam</b> serta Potensinya kepada masyarakat dan stakeholder.</p>
14. <b>Penyuluhan, evaluasi dan pelaporan di bidang bencana</b>	2	Mampu melaksanakan pengelolaan <b>Penyuluhan, evaluasi dan pelaporan di bidang bencana</b> sesuai pedoman kerja/petunjuk teknis	<p>2.1 Mampu Menyusun rencana pengelolaan <b>Penyuluhan, evaluasi dan pelaporan di bidang bencana</b></p> <p>2.2 Mampu melaksanakan pengelolaan <b>Penyuluhan, evaluasi dan pelaporan di bidang bencana.</b></p> <p>2.3 Mampu menjelaskan secara lengkap, rinci dan jelas perihal pengelolaan <b>Penyuluhan, evaluasi dan pelaporan di bidang bencana</b> serta Potensinya kepada masyarakat dan stakeholder.</p>
15. <b>Analisis kebutuhan penanganan darurat bencana</b>	2	Mampu melaksanakan pengelolaan <b>Analisis kebutuhan penanganan darurat bencana</b> sesuai pedoman kerja/petunjuk teknis	<p>2.1 Mampu Menyusun rencana pengelolaan <b>Analisis kebutuhan penanganan darurat bencana.</b></p> <p>2.2 Mampu melaksanakan pengelolaan <b>Analisis kebutuhan penanganan darurat bencana.</b></p> <p>2.3 Mampu menjelaskan secara lengkap, rinci dan jelas perihal pengelolaan <b>Analisis kebutuhan penanganan darurat bencana</b> serta Potensinya kepada masyarakat dan stakeholder.</p>

# Pemerintah Kabupaten Luwu Timur Tahun 2023

III. Persyaratan Jabatan					
Jenis Persyaratan	Uraian	Tingkat Pentingnya terhadap Jabatan			
		Mutlak	Penting	Perlu	
A. Pendidikan	1. Jenjang	Memiliki kualifikasi pendidikan paling rendah Sarjana atau Diploma IV			
	2. Bidang Ilmu	Sarjana/Manajemen, Administrasi dan bidang yang relevan dengan tugas jabatan			
B. Pelatihan	1. Manajerial	- Pelatihan Dasar CPNS	√		
	2. Teknis	- Diklat Manajemen Resiko		√	
		- Diklat Teknis Tata Naskah Dinas		√	
3. Fungsional	- Diklat Analisa Kawasan Rawan dan Bencana - Diklat Kesiagaan dan Sistem Tanggap Darurat		√ √		
C. Pengalaman Kerja	- Memiliki pengalaman dalam Jabatan pelaksana paling singkat 4 (empat) tahun atau JF yang setingkat dengan Jabatan pelaksana sesuai dengan bidang tugas Jabatan yang akan diduduki. - Memiliki integritas dan moralitas yang baik.		√ √		
D. Pangkat	Penata Muda / III.a				
E. Indikator Kinerja Jabatan	1. Optimalisasi pengumpulan bahan analisis potensi kebencanaan, ancaman, kerentanan, risiko, dan kapasitas 2. Peningkatan kualitas identifikasi bahan pelaksanaan evaluasi bidang kebencanaan 3. Kuantitas bahan naskah akademik kebijakan teknis sistem dan strategi penanggulangan bencana.				

## STANDAR KOMPETENSI JABATAN ASN

Nama Jabatan : Penata Penanggulangan Bencana Ahli Madya  
 Kelompok Jabatan : Fungsional  
 Urusan Pemerintah : Ketentraman dan Ketetapan Umum Serta Perlindungan Masyarakat  
 Kode Jabatan : -

I. IKHTISAR JABATAN			
Ikhtisar Jabatan	Melaksanakan penyelenggaraan penanggulangan bencana yang meliputi pengelolaan prabencana, penanganan darurat bencana, dan rehabilitasi dan rekonstruksi pasca bencana		
II. STANDAR KOMPETENSI			
Kompetensi	Level	Deskripsi	Indikator Kompetensi
<b>A. Manajerial</b>			
1. Integritas	4	Mampu menciptakan situasi kerja yang mendorong kepatuhan pada nilai, norma, dan etika organisasi	4.1. Menciptakan situasi kerja yang mendorong seluruh pemangku kepentingan mematuhi nilai, norma, dan etika organisasi dalam segala situasi dan kondisi. 4.2. Mendukung dan menerapkan prinsip moral dan standar etika yang tinggi, serta berani menanggung konsekuensinya. 4.3. Berani melakukan koreksi atau mengambil tindakan atas penyimpangan kode etik/nilai-nilai yang dilakukan oleh orang lain, pada tataran lingkup kerja setingkat instansi meskipun ada resiko.
2. Kerjasama	4	Membangun komitmen tim, sinergi	4.1. Membangun sinergi antar unit kerja di lingkup instansi yang dipimpin; 4.2. Memfasilitasi kepentingan yang berbeda dari unit kerja lain sehingga tercipta sinergi dalam rangka pencapaian target kerja organisasi. 4.3. Mengembangkan sistem yang menghargai kerja sama antar unit, memberikan dukungan / semangat untuk memastikan tercapainya sinergi dalam rangka pencapaian target kerja organisasi.
3. Komunikasi	4	Mampu mengemukakan pemikiran multidimensi secara lisan dan tertulis untuk mendorong	4.1 Mengintegrasikan informasi-informasi penting hasil diskusi dengan pihak lain untuk mendapatkan

		kesepakatan dengan tujuan meningkatkan kinerja secara keseluruhan	<p>pemahaman yang sama; Berbagi informasi dengan pemangku kepentingan untuk tujuan meningkatkan kinerja secara keseluruhan;</p> <p>4.2. Menuangkan pemikiran/konsep yang multidimensi dalam bentuk tulisan formal;</p> <p>4.3. Menyampaikan informasi secara persuasif untuk mendorong pemangku kepentingan sepakat pada langkah-langkah bersama dengan tujuan meningkatkan kinerja secara keseluruhan</p>
4. Orientasi pada Hasil	4	Mendorong unit kerja mencapai target yang ditetapkan atau melebihi hasil kerja sebelumnya	<p>4.1. Mendorong unit kerja di tingkat instansi untuk mencapai kinerja yang melebihi target yang ditetapkan;</p> <p>4.2. Memantau dan mengevaluasi hasil kerja unitnya agar selaras dengan sasaran strategis instansi;</p> <p>4.3. Mendorong pemanfaatan sumber daya bersama antar unit kerja dalam rangka meningkatkan efektifitas dan efisiensi pencapaian target organisasi</p>
5. Pelayanan Publik	4	Mampu memonitor, mengevaluasi, memperhitungkan dan mengantisipasi dampak dari isu-isu jangka panjang, kesempatan, atau kekuatan politik dalam hal pelayanan kebutuhan pemangku kepentingan yang transparan, objektif, dan profesional	<p>4.1. Memahami dan memberi perhatian kepada isu-isu jangka panjang, kesempatan atau kekuatan politik yang mempengaruhi organisasi dalam hubungannya dengan dunia luar, memperhitungkan dan mengantisipasi dampak terhadap pelaksanaan tugas-tugas pelayanan publik secara objektif, transparan, dan profesional dalam lingkup organisasi;</p> <p>4.2. Menjaga agar kebijakan pelayanan publik yang diselenggarakan oleh instansinya telah selaras dengan standar pelayanan yang objektif, netral, tidak memihak, tidak diskriminatif,</p>

			serta tidak terpengaruh kepentingan pribadi/kelompok/partai politik; 4.3. Menerapkan strategi jangka panjang yang berfokus pada pemenuhan kebutuhan pemangku kepentingan dalam menyusun kebijakan dengan mengikuti standar objektif, netral, tidak memihak, tidak diskriminatif, transparan, tidak terpengaruh kepentingan pribadi/kelompok
6. Pengembangan Diri dan Orang Lain	4	Menyusun program pengembangan jangka panjang dalam rangka mendorong manajemen pembelajaran	4.1. Menyusun program pengembangan jangka panjang bersama-sama dengan bawahan, termasuk didalamnya penetapan tujuan, bimbingan, penugasan dan pengalaman lainnya, serta mengalokasikan waktu untuk mengikuti pelatihan / pendidikan / pengembangan kompetensi dan karir; 4.2. Melaksanakan manajemen pembelajaran termasuk evaluasi dan umpan balik pada tataran organisasi; 4.3. Mengembangkan orang-orang disekitarnya secara konsisten, melakukan kaderisasi untuk posisi-posisi di unit kerjanya
7. Mengelola Perubahan	4	Memimpin perubahan pada unit kerja	4.1. Mengarahkan unit kerja untuk lebih siap dalam menghadapi perubahan termasuk memitigasi risiko yang mungkin terjadi; 4.2. Memastikan perubahan sudah diterapkan secara aktif di lingkup unit kerjanya secara berkala; 4.3. Memimpin dan memastikan penerapan program-program perubahan selaras antar unit kerja
8. Pengambilan Keputusan	4	Menyelesaikan masalah yang mengandung risiko tinggi, mengantisipasi dampak keputusan, membuat tindakan	4.1. Menyusun dan/atau memutuskan konsep penyelesaian masalah yang melibatkan beberapa/seluruh fungsi dalam organisasi.

		pengamanan; mitigasi risiko	<p>4.2. Menghasilkan solusi dari berbagai masalah yang kompleks, terkait dengan bidang kerjanya yang berdampak pada pihak lain.</p> <p>4.3. Membuat keputusan dan mengantisipasi dampak keputusannya serta menyiapkan tindakan penanganannya (mitigasi risiko)</p>
<b>B. Sosial Kultural</b>			
9. Perikat Bangsa	4	Mendayagunakan perbedaan secara konstruktif dan kreatif untuk meningkatkan efektifitas organisasi	<p>4.1 Menginisiasi dan merepresentasikan pemerintah di lingkungan kerja dan masyarakat untuk senantiasa menjaga persatuan dan kesatuan dalam keberagaman dan menerima segala bentuk perbedaan dalam kehidupan bermasyarakat;</p> <p>4.2 Mampu mendayagunakan perbedaan latar belakang, agama/kepercayaan, suku, jender, sosial ekonomi, preferensi politik untuk mencapai kelancaran pencapaian tujuan organisasi.</p> <p>4.3 Mampu membuat program yang mengakomodasi perbedaan latar belakang, agama/kepercayaan, suku, jender, sosial ekonomi, preferensi politik</p>
<b>C. Teknis</b>			
10. <b>Advokasi Kebijakan Otonomi Daerah</b>	4	Mampu mengembangkan strategi <b>advokasi kebijakan otonomi daerah</b> yang tepat sesuai kondisi.	<p>4.1 Mengevaluasi strategi advokasi yang ada saat ini, menganalisis kekuatan dan kekurangan berbagai metode yang dijalankan dengan kelompok sasaran yang berbeda.</p> <p>4.2 Mengembangkan norma standar, prosedur, kriteria, pedoman, dan/atau petunjuk teknis strategi <b>advokasi kebijakan otonomi daerah</b>.</p> <p>4.3 Meningkatkan kapasitas pemangku kepentingan untuk mengembangkan strategi</p>

			advokasi yang dapat dijalankan oleh mereka sendiri dalam menerapkan kebijakan otonomi daerah.
11. <b>Advokasi Kebijakan Ketentraman dan Ketertiban umum serta Perlindungan Masyarakat</b>	4	Mampu mengevaluasi dan menyusun perangkat norma standar prosedur instrument pengelolaan <b>Advokasi Kebijakan Ketentraman dan Ketertiban umum serta Perlindungan Masyarakat</b>	<p>4.1 Mampu melakukan evaluasi terhadap teknis/metode/sistem cara kerja menemu kenali kelebihan dan kekurangan melakukan pengembangan atau perbaikan cara kerja pengelolaan <b>Advokasi Kebijakan Ketentraman dan Ketertiban umum serta Perlindungan Masyarakat</b></p> <p>4.2 Mampu menyusun pedoman, petunjuk teknis, cara kerja yang dijadikan norma standar, prosedur, instrumen pelaksanaan pengelolaan <b>Advokasi Kebijakan Ketentraman dan Ketertiban umum serta Perlindungan Masyarakat</b></p> <p>4.3 Mampu meyakinkan dan memperoleh dukungan dari stakeholder pelaksanaan pengelolaan <b>Advokasi Kebijakan Ketentraman dan Ketertiban umum serta Perlindungan Masyarakat</b> dan memberikan bimbingan dan fasilitasi kepada instansi lain atau stakeholder terkait <b>Advokasi Kebijakan Ketentraman dan Ketertiban umum serta Perlindungan Masyarakat</b></p>
12. <b>Penanganan Darurat</b>	4	Mampu mengevaluasi dan menyusun perangkat norma standar prosedur instrument pengelolaan <b>Penanganan Darurat</b>	<p>4.1 Mampu melakukan evaluasi terhadap teknis/metode/sistem cara kerja menemu kenali kelebihan dan kekurangan melakukan pengembangan atau perbaikan cara kerja <b>Penanganan Darurat</b></p> <p>4.2 Mampu menyusun pedoman, petunjuk teknis, cara kerja yang dijadikan norma standar, prosedur, instrumen pelaksanaan <b>Penanganan Darurat</b></p>

			4.3 Mampu meyakinkan dan memperoleh dukungan dari stakeholder pelaksanaan <b>Penanganan Darurat</b> dan memberikan bimbingan dan fasilitasi kepada instansi lain atau stakeholder terkait <b>Penanganan Darurat</b>
<b>13. Pengelolaan Distribusi Logistik</b>	4	Mampu mengevaluasi dan menyusun perangkat norma standar prosedur instrument <b>Pengelolaan Distribusi Logistik</b>	<p>4.1 Mampu melakukan evaluasi terhadap teknis/metode/sistem cara kerja menemu kenali kelebihan dan kekurangan melakukan pengembangan atau perbaikan cara kerja <b>Pengelolaan Distribusi Logistik</b></p> <p>4.2 Mampu menyusun pedoman, petunjuk teknis, cara kerja yang dijadikan norma standar, prosedur, instrumen pelaksanaan <b>Pengelolaan Distribusi Logistik</b></p> <p>4.3 Mampu meyakinkan dan memperoleh dukungan dari stakeholder pelaksanaan <b>Penanganan Darurat</b> dan memberikan bimbingan dan fasilitasi kepada instansi lain atau stakeholder terkait <b>Pengelolaan Distribusi Logistik</b></p>
<b>14. Pengelolaan prabencana</b>	4	Mampu mengevaluasi dan menyusun perangkat norma standar prosedur instrument <b>Pengelolaan prabencana</b>	<p>4.1 Mampu melakukan evaluasi terhadap teknis/metode/sistem cara kerja menemu kenali kelebihan dan kekurangan melakukan pengembangan atau perbaikan cara kerja <b>Pengelolaan prabencana</b></p> <p>4.2 Mampu menyusun pedoman, petunjuk teknis, cara kerja yang dijadikan norma standar, prosedur, instrumen pelaksanaan <b>Pengelolaan prabencana</b></p> <p>4.3 Mampu meyakinkan dan memperoleh dukungan dari stakeholder <b>Pengelolaan prabencana</b> dan memberikan bimbingan dan fasilitasi kepada instansi lain atau stakeholder</p>

			terkait PEMBERDAYAAN <b>Pengelolaan prabencana</b>
<b>15. Rehabilitasi dan rekonstruksi</b>	4	Mampu mengevaluasi dan menyusun perangkat norma standar prosedur instrument pengelolaan <b>Rehabilitasi dan rekonstruksi</b>	<p>4.1 Mampu melakukan evaluasi terhadap teknis/metode/sistem cara kerja menemu kenali kelebihan dan kekurangan melakukan pengembangan atau perbaikan cara kerja pengelolaan <b>Rehabilitasi dan rekonstruksi</b></p> <p>4.2 Mampu menyusun pedoman, petunjuk teknis, cara kerja yang dijadikan norma standar, prosedur, instrumen pelaksanaan pengelolaan <b>Rehabilitasi dan rekonstruksi</b></p> <p>4.3 Mampu meyakinkan dan memperoleh dukungan dari stakeholder pelaksanaan pengelolaan <b>Rehabilitasi dan rekonstruksi</b> dan memberikan bimbingan dan fasilitasi kepada instansi lain atau stakeholder terkait Pengawasan Pengelolaan <b>Rehabilitasi dan rekonstruksi</b></p>

<b>III. Persyaratan Jabatan</b>					
<b>Jenis Persyaratan</b>		<b>Uraian</b>	<b>Tingkat Pentingnya terhadap Jabatan</b>		
			<b>Mutlak</b>	<b>Penting</b>	<b>Perlu</b>
A. Pendidikan	1. Jenjang	Memiliki kualifikasi pendidikan paling rendah sarjana atau diploma IV			
	2. Bidang Ilmu	Sarjana/Manajemen, Administrasi dan bidang yang relevan dengan tugas jabatan			
B. Pelatihan	1. Manajerial	Pelatihan Dasar CPNS	√		
	2. Teknis	1. Diklat Analisa Kawasan Rawan dan Benacan		√	
		2. Diklat Manajemen Resiko			√
3. Diklat Teknis Tata Naskah Dinas				√	
4. Fungsional	1. Diklat Kesiagaan dan Sistem Tanggap Darurat			√	
	2. Diklat Analisa Kawasan Rawan dan			√	

		Bencana			
C. Pengalaman Kerja		<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Memiliki pengalaman Jabatan dalam bidang tugas yang terkait dengan Jabatan yang akan diduduki secara kumulatif paling kurang selama 5 (lima) tahun.</li> <li>2. Sedang atau pernah menduduki Jabatan administrator atau JF jenjang ahli madya paling singkat 2 (dua) tahun.</li> <li>3. Memiliki rekam jejak Jabatan, integritas, dan moralitas yang baik</li> </ol>	<p style="text-align: center;">√</p> <p style="text-align: center;">√</p> <p style="text-align: center;">√</p>		
D. Pangkat		Pembina / IV.a			
E. Indikator Kinerja Jabatan		<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Kualitas penyusunan laporan upaya penanggulangan bencana secara berkala</li> <li>2. Optimalisasi penyusunan rekomendasi atas evaluasi pemulihan fungsi pemerintahan, fungsi pelayanan publik, keamanan dan ketertiban, serta rekonsiliasi dan resolusi konflik di daerah rawan bencana</li> <li>3. Optimalisasi pemberian bantuan perbaikan lingkungan, prasarana dan sarana umum daerah terdampak bencana</li> <li>4. Kuantitas evaluasi pelaksanaan operasi penanganan darurat bencana</li> </ol>			

## STANDAR KOMPETENSI JABATAN ASN

<b>Nama Jabatan</b>	:	Penata Penanggulangan Bencana Ahli Muda
<b>Kelompok Jabatan</b>	:	Fungsional
<b>Urusan Pemerintah</b>	:	Ketentraman dan Ketertiban Umum Serta Perlindungan Masyarakat
<b>Kode Jabatan</b>	:	

I. IKHTISAR JABATAN			
<b>Ikhtisar Jabatan</b>	Melaksanakan penyelenggaraan penanggulangan bencana yang meliputi pengelolaan prabencana, penanganan darurat bencana, dan rehabilitasi dan rekonstruksi pasca bencana		
II. STANDAR KOMPETENSI			
Kompetensi	Level	Deskripsi	Indikator Kompetensi
A. Manajerial			
1. <b>Integritas</b>	3	Mampu memastikan, menanamkan keyakinan bersama agar anggota yang dipimpin bertindak sesuai nilai, norma, dan etika organisasi, dalam lingkup formal	3.1 Memastikan anggota yang dipimpin bertindak sesuai dengan nilai, norma, dan etika organisasi dalam segala situasi dan kondisi 3.2 Mampu untuk memberi apresiasi dan teguran bagi anggota yang dipimpin agar bertindak selaras dengan nilai, norma, dan etika organisasi dalam segala situasi dan kondisi 3.3 Melakukan monitoring dan evaluasi terhadap penerapan sikap integritas di dalam unit kerja yang dipimpin
2. <b>Kerjasama</b>	3	Efektif membangun tim kerja untuk peningkatan kinerja organisasi	3.1. Melihat kekuatan/kelemahan anggota tim, membentuk tim yang tepat, mengantisipasi kemungkinan hambatan, dan mencari solusi yang optimal 3.2. Mengupayakan dan mengutamakan pengambilan keputusan berdasarkan usulan-usulan anggota tim/kelompok, bernegosiasi secara efektif untuk upaya penyelesaian pekerjaan yang menjadi target kinerja kelompok dan/atau unit kerja 3.3. Membangun aliansi dengan para pemangku kepentingan dalam rangka mendukung penyelesaian target kerja kelompok
3. <b>Komunikasi</b>	3	Berkomunikasi secara asertif, terampil berkomunikasi lisan/tertulis untuk menyampaikan informasi yang	3.1 Menyampaikan suatu informasi yang sensitif/rumit dengan cara penyampaian dan kondisi yang tepat, sehingga dapat dipahami dan diterima oleh pihak lain 3.2. Menyederhanakan topik yang rumit

		sensitif/ rumit/ kompleks	dan sensitif sehingga lebih mudah dipahami dan diterima orang lain 3.3. Membuat laporan tahunan/periodik/naskah/dokumen/proposal yang kompleks; Membuat surat resmi yang sistematis dan tidak menimbulkan pemahaman yang berbeda; membuat proposal yang rinci dan lengkap
<b>4. Orientasi pada Hasil</b>	3	Menetapkan target kerja yang menantang bagi unit kerja, memberi apresiasi dan teguran untuk mendorong kinerja	3.1. Menetapkan target kinerja unit yang lebih tinggi dari target yang ditetapkan organisasi 3.2. Memberikan apresiasi dan teguran untuk mendorong pencapaian hasil unit kerjanya 3.3. Mengembangkan metode kerja yang lebih efektif dan efisien untuk mencapai target kerja unitnya
<b>5. Pelayanan Publik</b>	3	Mampu memanfaatkan kekuatan kelompok serta memperbaiki standar pelayanan publik di lingkup unit kerja	3.1. Memahami, mendiskripsikan pengaruh dan hubungan/kekuatan kelompok yang sedang berjalan di organisasi (aliansi atau persaingan), dan dampaknya terhadap unit kerja untuk menjalankan tugas pemerintahan secara profesional dan netral, tidak memihak 3.2. Menggunakan keterampilan dan pemahaman lintas organisasi untuk secara efektif memfasilitasi kebutuhan kelompok yang lebih besar dengan cara-cara yang mengikuti standar objektif, transparan, profesional, sehingga tidak merugikan para pihak di lingkup pelayanan publik unit kerjanya 3.3. Mengimplementasikan cara-cara yang efektif untuk memantau dan mengevaluasi masalah yang dihadapi pemangku kepentingan/masyarakat serta mengantisipasi kebutuhan mereka saat menjalankan tugas pelayanan publik di unit kerjanya
<b>6. Pengembangan Diri dan Orang Lain</b>	3	Memberikan umpan balik, membimbing	3.1. Memberikan tugas-tugas yang menantang pada bawahan sebagai media belajar untuk mengembangkan kemampuannya 3.2. Mengamati bawahan dalam mengerjakan tugasnya dan

			<p>memberikan umpan balik yang objektif dan jujur; melakukan diskusi dengan bawahan untuk memberikan bimbingan dan umpan balik yang berguna bagi bawahan</p> <p>3.3. Mendorong kepercayaan diri bawahan; memberikan kepercayaan penuh pada bawahan untuk mengerjakan tugas dengan caranya sendiri; memberi kesempatan dan membantu bawahan menemukan peluang untuk berkembang</p>
<b>7. Mengelola Perubahan</b>	3	Membantu orang lain mengikuti perubahan, mengantisipasi perubahan secara tepat	<p>3.1. Membantu orang lain dalam melakukan perubahan</p> <p>3.2. Menyesuaikan prioritas kerja secara berulang-ulang jika diperlukan</p> <p>3.3. Mengantisipasi perubahan yang dibutuhkan oleh unit kerjanya secara tepat. Memberikan solusi efektif terhadap masalah yang ditimbulkan oleh adanya perubahan</p>
<b>8. Pengambilan Keputusan</b>	3	Membandingkan berbagai alternatif, menyeimbangkan risiko keberhasilan dalam implementasi	<p>3.1. Membandingkan berbagai alternatif tindakan dan implikasinya</p> <p>3.2. Memilih alternatif solusi yang terbaik, membuat keputusan operasional mengacu pada alternatif solusi terbaik yang didasarkan pada analisis data yang sistematis, seksama, mengikuti prinsip kehati-hatian</p> <p>3.3. Menyeimbangkan antara kemungkinan risiko dan keberhasilan dalam implementasinya</p>
<b>B. Sosial Kultural</b>			
<b>9. Perekat Bangsa</b>	3	Mempromosikan, mengembangkan sikap toleransi dan persatuan	<p>3.1. Mempromosikan sikap menghargai perbedaan di antara orang-orang yang mendorong toleransi dan keterbukaan</p> <p>3.2. Melakukan pemetaan sosial di masyarakat sehingga dapat memberikan respon yang sesuai dengan budaya yang berlaku. Mengidentifikasi potensi kesalahpahaman yang diakibatkan adanya keragaman budaya yang ada</p> <p>3.3. Menjadi mediator untuk menyelesaikan konflik atau mengurangi dampak negatif dari konflik atau potensi konflik</p>

C. Teknis			
10. <b>Advokasi Kebijakan Otonomi Daerah</b>	3	Mampu menyelenggarakan <b>advokasi kebijakan otonomi daerah</b>	<p>3.1 Mampu menyusun instrumen, materi, dan kelengkapan pelaksanaan <b>advokasi kebijakan otonomi daerah</b>.</p> <p>3.2 Mampu mengembangkan serta menjalankan strategi atau intervensi advokasi dalam mengatasi hambatan sistemik dan resistensi pemangku kepentingan dalam menerapkan kebijakan otonomi daerah</p> <p>3.3 Mampu mengimplementasikan strategi advokasi dengan target dan waktu yang terukur dan terencana dengan mendapatkan hasil sesuai yang diharapkan</p>
11. <b>Advokasi Kebijakan Ketentraman dan Ketertiban umum serta Perlindungan Masyarakat</b>	3	Mampu mengidentifikasi Prinsip-prinsip teori dan praktek tanpa bantuan atau pengawasan langsung tentang pengembangan <b>Advokasi Kebijakan Ketentraman dan Ketertiban umum serta Perlindungan Masyarakat</b> Strategis yang dimiliki oleh organisasi dengan menggunakan metode yang sistematis.	<p>3.1 Menguasai pengetahuan dan keterampilan tentang <b>Advokasi Kebijakan Ketentraman dan Ketertiban umum serta Perlindungan Masyarakat</b> dalam rangka tercapainya tujuan visi dan misi organisasi dengan mengikuti pelatihan tingkat menengah</p> <p>3.2 Mampu melakukan tugas <b>Advokasi Kebijakan Ketentraman dan Ketertiban umum serta Perlindungan Masyarakat</b> secara spesifik dan menganalisis informasi untuk menyelesaikan permasalahan yang timbul dalam tugas</p> <p>3.3 Mampu menganalisa proses pelaksanaan <b>Advokasi Kebijakan Ketentraman dan Ketertiban umum serta Perlindungan Masyarakat</b> tanpa bantuan atau pengawasan langsung dengan kecepatan dan penyelesaian yang lebih tepat</p>
12. <b>Penanganan Darurat</b>	3	Mampu mengidentifikasi Prinsip-prinsip teori dan praktek tanpa bantuan atau pengawasan langsung tentang <b>Penanganan Darurat</b>	<p>3.1 Menguasai pengetahuan dan keterampilan tentang <b>Penanganan Darurat</b> dalam rangka tercapainya tujuan visi dan misi organisasi dengan mengikuti pelatihan tingkat menengah</p> <p>3.2 Mampu melakukan tugas <b>Penanganan Darurat</b> secara</p>

		yang dimiliki oleh organisasi dengan menggunakan metode yang sistematis.	3.3 Mampu menganalisa proses pelaksanaan <b>Penanganan Darurat</b> tanpa bantuan atau pengawasan langsung dengan kecepatan dan penyelesaian yang lebih tepat
13. <b>Pengelolaan Distribusi Logistik</b>	3	Mampu mengidentifikasi Prinsip-prinsip teori dan praktek tanpa bantuan atau pengawasan langsung tentang <b>Pengelolaan Distribusi Logistik</b> yang dimiliki oleh organisasi dengan menggunakan metode yang sistematis.	3.1 Menguasai pengetahuan dan keterampilan tentang <b>Pengelolaan Distribusi Logistik</b> dalam rangka tercapainya tujuan visi dan misi organisasi dengan mengikuti pelatihan tingkat menengah 3.2 Mampu melakukan tugas <b>Pengelolaan Distribusi Logistik</b> secara spesifik dan menganalisis informasi untuk menyelesaikan permasalahan yang timbul dalam tugas 3.3 Mampu menganalisa proses pelaksanaan <b>Pengelolaan Distribusi Logistik</b> tanpa bantuan atau pengawasan langsung dengan kecepatan dan penyelesaian yang lebih tepat
14. <b>Pengelolaan prabencana</b>	3	Mampu mengidentifikasi Prinsip-prinsip teori dan praktek tanpa bantuan atau pengawasan langsung tentang <b>Pengelolaan prabencana</b> di organisasi yang dimiliki oleh organisasi dengan menggunakan metode yang sistematis.	3.1 Menguasai pengetahuan dan keterampilan tentang <b>Pengelolaan prabencana</b> di organisasi dalam rangka tercapainya tujuan visi dan misi organisasi dengan mengikuti pelatihan tingkat menengah 3.2 Mampu melakukan tugas <b>Pengelolaan prabencana</b> di organisasi secara spesifik dan menganalisis informasi untuk menyelesaikan permasalahan yang timbul dalam tugas 3.3 Mampu menganalisa proses pelaksanaan <b>Pengelolaan prabencana</b> di organisasi tanpa bantuan atau pengawasan langsung dengan kecepatan dan penyelesaian yang lebih tepat
15. <b>Rehabilitasi dan Rekonstruksi</b>	3	Mampu mengidentifikasi Prinsip-prinsip teori dan praktek tanpa	3.1 Menguasai pengetahuan dan keterampilan tentang <b>Rehabilitasi dan Rekonstruksi</b> dalam rangka tercapainya tujuan visi dan misi

		bantuan atau pengawasan langsung tentang <b>Rehabilitasi dan Rekonstruksi</b> yang dimiliki oleh organisasi dengan menggunakan metode yang sistematis.	3.2 organisasi dengan mengikuti pelatihan tingkat menengah Mampu melakukan tugas <b>Rehabilitasi dan Rekonstruksi</b> secara spesifik dan menganalisis informasi untuk menyelesaikan permasalahan yang timbul dalam tugas
			3.3 Mampu menganalisa proses pelaksanaan <b>Rehabilitasi dan Rekonstruksi</b> tanpa bantuan atau pengawasan langsung dengan kecepatan dan penyelesaian yang lebih tepat

### III. Persyaratan Jabatan

Jenis Persyaratan		Uraian	Tingkat Pentingnya terhadap Jabatan		
			Mutlak	Penting	Perlu
A. Pendidikan	1. Jenjang	Memiliki kualifikasi pendidikan paling rendah Sarjana atau Diploma IV			
	2. Bidang Ilmu	Sarjana/Manajemen, Administrasi dan bidang yang relevan dengan tugas jabatan			
B. Pelatihan	1. Manajerial	- Pelatihan Dasar CPNS	√		
	2. Teknis	- Diklat Manajemen Resiko		√	
		- Diklat Teknis Tata Naskah Dinas		√	
3. Fungsional	- Diklat Analisa Kawasan Rawan dan Benacn			√	
	- Diklat Kesiagaan dan Sistem Tanggap Darurat			√	
C. Pengalaman Kerja		- Memiliki pengalaman dalam Jabatan pelaksana paling singkat 4 (empat) tahun atau JF yang setingkat dengan Jabatan pelaksana sesuai dengan bidang tugas Jabatan yang akan diduduki. - Memiliki integritas dan moralitas yang baik.	√		
D. Pangkat		Penata / III.c			
E. Indikator Kinerja Jabatan		1. Kuantitas identifikasi kebutuhan penyusunan rencana aksi pengurangan risiko bencana 2. Optimalisasi sosialisasi budaya sadar bencana 3. Optimalisasi petunjuk pelaksanaan penanganan darurat 4. Kualitas penguatan forum Pengurangan Risiko Bencana			

# Pemerintah Kabupaten Luwu Timur Tahun 2023

## STANDAR KOMPETENSI JABATAN ASN

Nama Jabatan	:	Penata Penanggulangan Bencana Ahli Pertama
Kelompok Jabatan	:	Fungsional
Urusan Pemerintah	:	Ketentraman dan Ketetapan Umum Serta Perlindungan Masyarakat
Kode Jabatan	:	

I. IKHTISAR JABATAN			
Ikhtisar Jabatan	Melaksanakan penyelenggaraan penanggulangan bencana yang meliputi pengelolaan prabencana, penanganan darurat bencana, dan rehabilitasi dan rekonstruksi pasca bencana.		
II. STANDAR KOMPETENSI			
Kompetensi	Level	Deskripsi	Indikator Kompetensi
A. Manajerial			
1. Integritas	2	Mampu memastikan, menanamkan keyakinan bersama agar anggota yang dipimpin bertindak sesuai nilai, norma, dan etika organisasi, dalam lingkup formal	2.1 Memastikan anggota yang dipimpin bertindak sesuai dengan nilai, norma, dan etika organisasi dalam segala situasi dan kondisi 2.2 Mampu untuk memberi apresiasi dan teguran bagi anggota yang dipimpin agar bertindak selaras dengan nilai, norma, dan etika organisasi dalam segala situasi dan kondisi 2.3 Melakukan monitoring dan evaluasi terhadap penerapan sikap integritas di dalam unit kerja yang dipimpin
2. Kerjasama	2	Menumbuhkan tim kerja yang partisipatif dan efektif	2.1. Membantu orang lain dalam menyelesaikan tugas-tugas mereka untuk mendukung sasaran tim 2.2. Berbagi informasi yang relevan atau bermanfaat pada anggota tim; mempertimbangkan masukan dan keahlian anggota dalam tim/kelompok kerja serta bersedia untuk belajar dari orang lain 2.3. Membangun komitmen yang tinggi untuk menyelesaikan tugas tim
3. Komunikasi	2	Aktif menjalankan komunikasi secara formal dan informal;	2.1 Menggunakan gaya komunikasi informal untuk meningkatkan hubungan

# Pemerintah Kabupaten Luwu Timur Tahun 2023

		Bersedia mendengarkan orang lain, menginterpretasikan pesan dengan respon yang sesuai, mampu menyusun materi presentasi, pidato, naskah, laporan, dll	<p>profesional</p> <p>2.2. Mendengarkan pihak lain secara aktif; menangkap dan menginterpretasikan pesan-pesan dari orang lain, serta memberikan respon yang sesuai</p> <p>2.3. Membuat materi presentasi, pidato, draft naskah, laporan dll sesuai arahan pimpinan</p>
4. Orientasi pada Hasil	2	Berupaya meningkatkan hasil kerja pribadi yang lebih tinggi dari standar yang ditetapkan, mencari, mencoba metode alternatif untuk peningkatan kinerja	<p>2.1. Menetapkan dan berupaya mencapai standar kerja pribadi yang lebih tinggi dari standar kerja yang ditetapkan organisasi</p> <p>2.2. Mencari, mencoba metode kerja alternatif untuk meningkatkan hasil kerjanya</p> <p>2.3. memberi contoh kepada orang-orang unit kerjanya untuk mencoba menerapkan metode kerja yang lebih efektif yang sudah dilakukannya</p>
5. Pelayanan Publik	2	Mampu mensupervisi/mengawasi/menyelia dan menjelaskan proses pelaksanaan tugas tugas pemerintahan/pelayanan publik secara transparan	<p>2.1. Menunjukkan sikap yakin dalam mengerjakan tugas-tugas pemerintahan/pelayanan publik, mampu menyelia dan menjelaskan secara obyektif bila ada yang mempertanyakan kebijakan yang diambil</p> <p>2.2. Secara aktif mencari informasi untuk mengenali kebutuhan pemangku kepentingan agar dapat menjalankan pelaksanaan tugas pemerintahan, pembangunan dan pelayanan publik secara cepat dan tanggap</p> <p>2.3. Mampu mengenali dan memanfaatkan kebiasaan, tatacara, situasi tertentu sehingga apa yang disampaikan menjadi perhatian pemangku kepentingan dalam hal penyelesaian tugas-tugas pemerintahan, pembangunan dan pelayanan publik</p>

# Pemerintah Kabupaten Luwu Timur Tahun 2023

6. Pengembangan Diri dan Orang Lain	2	Meningkatkan kemampuan bawahan dengan memberikan contoh dan penjelasan cara melaksanakan suatu pekerjaan	<p>2.1. Meningkatkan kemampuan bawahan dengan memberikan contoh, instruksi, penjelasan dan petunjuk praktis yang jelas kepada bawahan dalam menyelesaikan suatu pekerjaan</p> <p>2.2. Membantu bawahan untuk mempelajari proses, program atau sistem baru</p> <p>2.3. Menggunakan metode lain untuk meyakinkan bahwa orang lain telah memahami penjelasan atau pengarahan</p>
7. Mengelola Perubahan	2	Proaktif beradaptasi mengikuti perubahan	<p>2.1. Menyesuaikan cara kerja lama dengan menerapkan metode/proses baru selaras dengan ketentuan yang berlaku tanpa arahan orang lain</p> <p>2.2. Mengembangkan kemampuan diri untuk menghadapi perubahan</p> <p>2.3. Cepat dan tanggap dalam menerima perubahan</p>
8. Pengambilan Keputusan	2	Menganalisis masalah secara mendalam	<p>2.1. Melakukan analisis secara mendalam terhadap informasi yang tersedia dalam upaya mencari solusi</p> <p>2.2. Mempertimbangkan berbagai alternatif yang ada sebelum membuat</p> <p>2.3. Membuat keputusan operasional berdasarkan kesimpulan dari berbagai sumber informasi sesuai dengan pedoman yang ada</p>
<b>B. Sosial Kultural</b>			
9. Perekat Bangsa	2	Aktif mengembangkan sikap saling menghargai, menekankan persamaan dan persatuan	<p>2.1 menampilkan sikap dan perilaku yang peduli akan nilai-nilai keberagaman dan menghargai perbedaan</p> <p>2.2 Membangun hubungan baik antar individu dalam organisasi, mitra kerja, pemangku kepentingan</p> <p>2.3 Bersikap tenang, mampu mengendalikan emosi, kemarahan dan frustrasi dalam</p>

# Pemerintah Kabupaten Luwu Timur Tahun 2023

			menghadapi pertentangan yang ditimbulkan oleh perbedaan latar belakang, agama/kepercayaan, suku, jender, sosial ekonomi, preferensi politik di lingkungan unit kerjanya
<b>C. Teknis</b>			
10. <b>Advokasi Kebijakan Otonomi Daerah</b>	2	Mampu melaksanakan pengelolaan <b>Advokasi Kebijakan Otonomi Daerah</b> sesuai pedoman kerja/petunjuk teknis	2.1 Mampu Menyusun rencana pengelolaan <b>Advokasi Kebijakan Otonomi Daerah</b> 2.2 Mampu melaksanakan pengelolaan <b>Advokasi Kebijakan Otonomi Daerah</b> . 2.3 Mampu menjelaskan secara lengkap, rinci dan jelas perihal pengelolaan <b>Advokasi Kebijakan Otonomi Daerah</b> serta Potensinya kepada masyarakat dan stakeholder.
11. <b>Advokasi Kebijakan Ketentraman dan Ketertiban umum serta Perlindungan Masyarakat</b>	2	Mampu melaksanakan pengelolaan <b>Advokasi Kebijakan Ketentraman dan Ketertiban umum serta Perlindungan Masyarakat</b> sesuai pedoman kerja/petunjuk teknis	2.1 Mampu Menyusun rencana pengelolaan <b>Advokasi Kebijakan Ketentraman dan Ketertiban umum serta Perlindungan Masyarakat</b> 2.2 Mampu melaksanakan pengelolaan <b>Advokasi Kebijakan Ketentraman dan Ketertiban umum serta Perlindungan Masyarakat</b> . 2.3 Mampu menjelaskan secara lengkap, rinci dan jelas perihal pengelolaan <b>Advokasi Kebijakan Ketentraman dan Ketertiban umum serta Perlindungan Masyarakat</b> serta Potensinya kepada masyarakat dan stakeholder.
12. <b>Penanganan Darurat</b>	2	Mampu melaksanakan pengelolaan <b>Penanganan Darurat</b> sesuai pedoman kerja/petunjuk teknis	2.1 Mampu Menyusun rencana pengelolaan <b>Penanganan Darurat</b> . 2.2 Mampu melaksanakan pengelolaan <b>Penanganan Darurat</b> . 2.3 Mampu menjelaskan secara lengkap, rinci dan jelas perihal pengelolaan <b>Penanganan Darurat</b> serta Potensinya kepada masyarakat dan

# Pemerintah Kabupaten Luwu Timur Tahun 2023

			stakeholder.
13. <b>Pengelolaan Distribusi Logistik</b>	2	Mampu melaksanakan pengelolaan <b>Pengelolaan Distribusi Logistik</b> sesuai pedoman kerja/petunjuk teknis	2.1 Mampu Menyusun rencana pengelolaan <b>Pengelolaan Distribusi Logistik</b> . 2.2 Mampu melaksanakan pengelolaan <b>Pengelolaan Distribusi Logistika</b> . 2.3 Mampu menjelaskan secara lengkap, rinci dan jelas perihal pengelolaan <b>Pengelolaan Distribusi Logistik</b> serta Potensinya kepada masyarakat dan stakeholder.
14. <b>Pengelolaan prabencana</b>	2	Mampu melaksanakan pengelolaan <b>Pengelolaan prabencana</b> sesuai pedoman kerja/petunjuk teknis	2.1 Mampu Menyusun rencana pengelolaan <b>Pengelolaan prabencana</b> 2.2 Mampu melaksanakan pengelolaan <b>Pengelolaan prabencana</b> . 2.3 Mampu menjelaskan secara lengkap, rinci dan jelas perihal pengelolaan <b>Pengelolaan prabencana</b> serta Potensinya kepada masyarakat dan stakeholder.
15. <b>Rehabilitasi dan Rekonstruksi</b>	2	Mampu melaksanakan pengelolaan <b>Rehabilitasi dan Rekonstruksi</b> sesuai pedoman kerja/petunjuk teknis	2.1 Mampu Menyusun rencana pengelolaan <b>Rehabilitasi dan Rekonstruksi</b> . 2.2 Mampu melaksanakan pengelolaan <b>Rehabilitasi dan Rekonstruksi</b> . 2.3 Mampu menjelaskan secara lengkap, rinci dan jelas perihal pengelolaan <b>Rehabilitasi dan Rekonstruksi</b> serta Potensinya kepada masyarakat dan stakeholder.

### III. Persyaratan Jabatan

Jenis Persyaratan		Uraian	Tingkat Pentingnya terhadap Jabatan		
			Mutlak	Penting	Perlu
A. Pendidikan	1. Jenjang	Memiliki kualifikasi pendidikan paling rendah Sarjana atau Diploma IV			
	2. Bidang Ilmu	Sarjana/Manajemen, Administrasi dan bidang yang relevan dengan tugas jabatan			
B. Pelatihan	1. Manajerial	- Pelatihan Dasar CPNS	√		
	2. Teknis	- Diklat Manajemen Resiko - Diklat Teknis Tata Naskah		√	

# Pemerintah Kabupaten Luwu Timur Tahun 2023

		Dinas		√	
	3. Fungsional	- Diklat Analisa Kawasan Rawan dan Benacan - Diklat Kesiagaan dan Sistem Tanggap Darurat		√ √	
<b>C. Pengalaman Kerja</b>		- Memiliki pengalaman dalam Jabatan pelaksana paling singkat 4 (empat) tahun atau JF yang setingkat dengan Jabatan pelaksana sesuai dengan bidang tugas Jabatan yang akan diduduki. - Memiliki integritas dan moralitas yang baik.	√ √		
<b>D. Pangkat</b>		Penata Muda / III.a			
<b>E. Indikator Kinerja Jabatan</b>		<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Optimalisasi penyiapan penyusunan rencana penanggulangan bencana</li> <li>2. Kualitas informasi hasil kajian risiko bencana</li> <li>3. Optimalisasi kebutuhan data dan informasi kebencanaan.</li> <li>4. Kualitas pengolahan dan analisis data dampak dan kebutuhan penanganan darurat</li> </ol>			